

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yaitu melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, berupaya tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Panekan, 27 Februari 2026
CAMAT PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR IS

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	6
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	7
D. Sumber Daya Organisasi	8
1. Kepegawaian	9
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Anggaran	10
E. Identifikasi Permasalahan Utama Perangkat Daerah	11
F. Landasan Hukum	11
G. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	15
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	16
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	18
B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	22
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	23
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	24
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029	26
C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	41
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	41
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen	

perencanaan strategis organisasi	51
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	52
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	52
B. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	54
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	55
D. Inovasi Tahun 2025	58
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025	58
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Rencana Aksi Tahun 2026	61
LAMPIRAN	
A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah	
B. Matriks Renstra terakhir	
C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama	
D. Matriks Renja Tahun 2025 terakhir	
E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahan	
F. Pohon Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Panekan selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang pelayanan publik, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panekan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Panekan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Panekan pada tahun berikutnya.

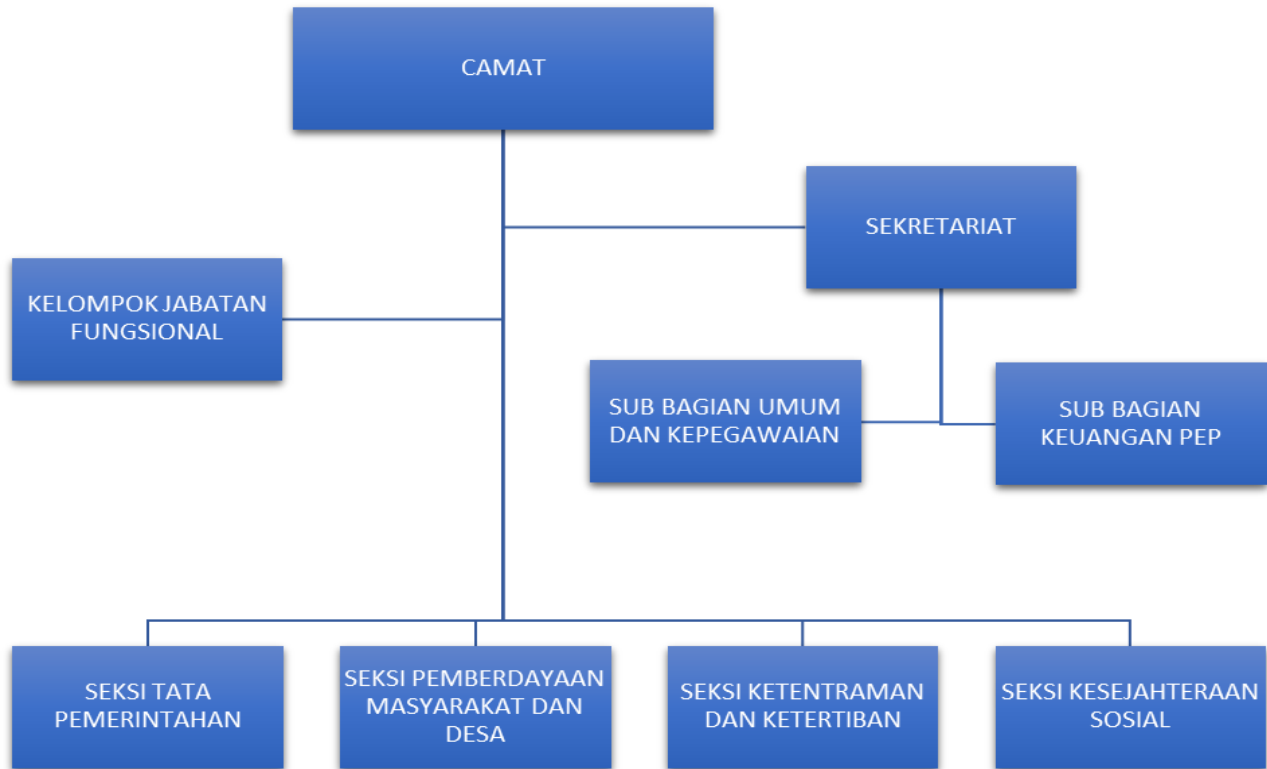
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 7, Kecamatan Panekan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan Panekan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Panekan terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan PEP
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1
Susunan Organisasi
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Panekan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan pada pasal 8, Kecamatan Panekan mempunyai tugas : Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Kecamatan Panekan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Kecamatan Panekan didukung oleh pegawai sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/ Kelebihan (orang)
1.	Jabatan Fungsioanal Tertentu	1	-	1
2.	Pengolah Data Dan Informasi	1	-	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1
	Jumlah	3	-	3

- b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	-

3	Pembina Tk.I/IV-b	
4	Pembina/IV-a	3
5	Penata Tk.I/III-d	5
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	4
8	Penata Muda/III-a	2
9	/II-d	1
10	/II-c	1
11	/II-b	
12	/IIa	
	Jumlah	18

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	1
3	Strata 1/Sederajat	8
4	Diploma	4
5	SMA/Sederajat	5
6	SMP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	18

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	14
2	Perempuan	4
	Jumlah	18

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Panekan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Kecamatan Panekan
per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun n-1 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun n (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	442.500.000	-	-	442.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	617.652.092	14.270.000	-	631.652.092
3.	Gedung dan Bangunan	893.275.318	-	-	893.275.318
	Jumlah	1.953.427.410			1.967.427.410

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3. 696.563.293 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Kecamatan Panekan
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Pagu Anggaran Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.913.289.455	2.610.481.286
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22.698.400	15.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	974.211.200	969.500.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	107.481.200	107.579.100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.620.600	18.325.000
Jumlah	3.034.300.855	3.720.885.386

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Panekan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
 - keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan.
 - Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan
- 2) Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan
 - Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur.
- 3) Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertikal dan horizontal di wilayah Kecamatan
- 4) Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis
 - Dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi , kerawanan bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan
 - koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Panekan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Bupati Magetan 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Ssaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif tindakan yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta indikator di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dan tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan mengalami transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada ndic sebagai berikut:

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Panekan mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan ke empat RPD Kabupaten Magetan berikut ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan Tujuan Bupati Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan (RPD) ke- 4	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Indikator	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran (RPD) ke- 4.5	:	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik
Indikator	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
Tujuan (Renstra) ke- 1	:	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan
Indikator	:	IKM Kecamatan Panekan
Sasaran (Renstra) ke- 1.1	:	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan
Indikator	:	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan
Sasaran (Renstra) ke- 1.2	:	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Pada Kecamatan Panekan
Indikator	:	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Renstra RPD)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan Pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2024- 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan Panekan	Skor	89	89,5	90

		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kecamatan Panekan	Nilai	82,6	83	83,2
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	84,75	85	86

Sumber : Renstra Kecamatan Panekan Periode 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan Pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

Tujuan Ke 4	: Meningkatkan tata Kelola yang baik dan bersih		
Tujuan Ke 5	: Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	2. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik b. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan c. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan d. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum e. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
	3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan	1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	1.	IKM Kecamatan Panekan	Skor	9 Parameter : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksanaan 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Nilai Parameter = nilai rata-rata per parameter x (Jumlah bobot: Jumlah parameter) Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter : Jumlah parameter) x 25	Laporan SKM Kecamatan Panekan
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	1.1	Nilai predikat kinerja Kecamatan Panekan	Nilai	7 Aspek penilai meliputi : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umu 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegative 4. Pelaksanaan tugas atribut 5. Inovasi /.kreativitas Kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 8 aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magetan

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan	1.2	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik,yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) di setiap level secara logis , serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen pengukuran : 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dilakukan dalam pemberian Reward dan Panishment, serta penyesuaian stragegi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	$(30\% \times \text{Nilai Perencanaan}) + (30\% \times \text{Nilai Pengukuran}) + (15\% \times \text{Nilai Pelaporan}) + (25\% \times \text{Nilai Evaluasi})$	Inspektorat Daerah
--	-----	-------------------------------	-------	--	---	--------------------

				Komponen pelaporan : 1. Pelaporan KInerkoja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengna Analisa yang lengkap 3. LKJiP diajdikan acuan dalam Perencanaan 4. memuat Rencana Aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi yang dinilai 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun Rencana Aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKJiP dijadikan acuan dalam penyusunan dalam perencanaan tahun berikutnya		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panekan Tahun 2024-2026

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi
Bupati Magetan Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD)	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD)	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif , dan transparan
Tujuan (RPJMD) ke-3	: Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Professional, responsif, Adaptif dan transparan
Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran (RPJMD) ke- 4	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator	: Indeks Pelayanan Publik
Tujuan (Renstra) ke-1	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan
Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran (Renstra) ke- 1	: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan
Indikator	: Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan
Sasaran (Renstra) ke- 2	: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan
Indikator	: Nilai SAKIP

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan periode 2025- 2029 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2025- 2029

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	89	93	90,2	90,4	90,5
		1.1	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerinitahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	83	86,5	83,2	83,4	83,5

		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	Nilai	85	87,	87,5	87,7	97,9
--	--	-----	--	-------------	-------	----	-----	------	------	------

Sumber : Renstra Kecamatan Panekan Periode 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

Visi : Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan			
Misi ke-3 : Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Konsolidasi pelaksanaan awal Renstra dan penguatan dasar sistem dasar, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan regulasi pendukung	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan
	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan	Penguatan Penerapan sistem, integrasi layanan, dan peningkatan partisipasi publik	Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif

		Pendalaman Evaluasi sistem, penyempurnaan berkelanjutan, dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan
		Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2025-2029

SKPD : KECAMATAN PANEKAN
 Visi : Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
 Misi : Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif adaptifn dan transparan
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani XsebagianUrusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator pe nyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan, perundang-oun dangan dan pemeliharaan sarana prasaranaserta pelayanan administrasi surat menyuratsecaraumum kepadamasyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Hasil Laporan SKM Kecamatan Panekan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasi Tata Pemerintahan - Kasi PMD - Kasi Kesos

2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian -Kasi Tata Pemerintahan - Kasi PMD -Kasi Kesos																											
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan merupakan hasil evaluasi internal ats implementasi SAKIP yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Magetan <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sub Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Komponen Perencanaan</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komponen Pengukuran</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Komponen Pelaporan</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Komponen Evaluasi Akuntabilitas</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nilai Akhir</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> Komponen Perencanaan yang dinilai : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sub Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokumen Perencanaan tersedia</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokumen Perencanaan kinerja</td> <td>9.00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sub Komponen	Bobot	1	Komponen Perencanaan	30.00	2	Komponen Pengukuran	30.00	3	Komponen Pelaporan	15.00	4	Komponen Evaluasi Akuntabilitas	25.00	Nilai Akhir		100.00	No	Sub Komponen	Bobot	1	Dokumen Perencanaan tersedia	6.00	2	Dokumen Perencanaan kinerja	9.00	Hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian -Kasubag PEP -Kasi Tata Pemerintahan - Kasi PMD Kasi Kesos
No	Sub Komponen	Bobot																														
1	Komponen Perencanaan	30.00																														
2	Komponen Pengukuran	30.00																														
3	Komponen Pelaporan	15.00																														
4	Komponen Evaluasi Akuntabilitas	25.00																														
Nilai Akhir		100.00																														
No	Sub Komponen	Bobot																														
1	Dokumen Perencanaan tersedia	6.00																														
2	Dokumen Perencanaan kinerja	9.00																														

				telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART	
			3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00
			Nilai Akhir		30.00
		Komponen Pengukuran yang dinilai:			
			No	Sub Komponen	Bobot
			1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6.00
			2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan	9.00
			3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00
			Nilai Akhir		30.00
		Komponen Pelaporan, yang dinilai :			
			No	Sub Komponen	Bobot
			1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3.00
			2	Dokumen Laporan kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas ats	4.50

				pencapaian kinerja ,informasi keberhasilan kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan			
			3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi /.kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50		
			Nilai Akhir		15.00		
			Komponen Evaluasi, yang dinilai :				
			No	Sub Komponen	Bobot		
			1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan	5.00		
			2	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara brkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50		
			3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja/tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (unit kerja)	12.50		
			Nilai Akhir		25.00		

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Panekan Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan Panekan	Skor	89
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai	83
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	85

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Panekan :

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Panekan :

Tabel 2.10
Program Kegiatan dan Pagu Anggaran
Kecamatan Panekan
Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Kecamatan Panekan				
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	80 angka	2.424.245.755
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 laporan	6.348.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	35 dokumen	2.143.688.160
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	112.407.481
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	97.430.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	64.371.414
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 %	22.698.400
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 kegiatan	22.698.400

3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	49.337.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	49.337.500
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	107.481200
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	12 Kegiatan	107.481.200
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa/Kelurahan dengan nilai moneyv terpadu 80 %	100 %	16.620.600
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	12 kegiatan	16.620.600
Jumlah				2.620.383.455
Kelurahan Panekan				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kelurahan Panekan	%	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	12

Jumlah Kelurahan	1.413.917.400
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	4.034.300.855

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 . Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	1.1	Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai	83
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kecamatan Panekan	1.2	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	85

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan Panekan	Skor	89
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai	83
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	85

D. Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Pada tanggal 1 bulan Nopember tahun 2025 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran. Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2025. Adapun perubahan rincian program dan kegiatan Kecamatan Panekan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Perubahan Program/Kegiatan/Anggaran
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Kecamatan Panekan				
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	80 angka	2.195.185.993
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 laporan	3.356.150
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	35 dokumen	1.986.278.788
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	64.193.191
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	71.619.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	69.738.864
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 %	16.621.300
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	12 kegiatan	16.621.300
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	24.012.100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	24.012.100
4.	Program	Presentasi Kegiatan	100 %	97.177.500

	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Koordinasi Upya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	12 Kegiatan	97.177.500
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa/Kelurahan dengan nilai moneyv terpadu 80 %	100 %	15.393.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	12 kegiatan	15.393.000
Jumlah				2.348.389.893
Kelurahan Panekan				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kelurahan Panekan	80 angka	433.700.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	80.789.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	253.711.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	99.200.000
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	914.472.700
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Kegiatan	914.472.700
Jumlah				1.348.173.400
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan				3.696.563.293

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panekan

Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Pada tanggal Tiga bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	1.1	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai	83
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Panekan	1.2	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	Nilai	85

85Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Tahun 2025

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Kecamatan Panekan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

1. Perubahan anggaran menyesuaikan Kebijakan keuangan Daerah.
2. Perubahan menyesuaikan kebutuhan perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan	Cukup Berhasil

		kurang dari tujuh puluh lima persen	
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk) Kecamatan Panekan
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83 Nilai	86,2	103	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85 Nilai	87,25	102	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan)
Kecamatan Panekan
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83	86,2	103	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85	87,25	102	Sangat Berhasil

Uraian Tabel :

Persentase capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$$

1. Pada Sasaran Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Panekan dengan indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan , penilaian pada tahun 2025 yang dilaksanakan setelah ditetapkannya perjanjian kinerja tahun 2025 dengan target capaian 83 nilai. Dari target 83 nilai tersebut yang telah ditetapkan tercapai nilai realisasi sebesar 86,2 nilai. Pencapaian kinerja mencapai 103 % dari target yang telah ditetapkan. Dari skala penilaian capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat berhasil. Pencapaian nilai tersebut mengalami peningkatan 3,68 nilai dari pencapaian di tahun sebelumnya (Tahun 2024) dimana Kecamatan Panekan mendapatkan nilai 82,52 dalam penilaian EKK yang dilaksanakan oleh bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magetan.
2. Pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Panekan , dari target senilai 85 nilai tercapai 87,25 nilai. Pencapaian kinerja mencapai 102 % dari target yang telah ditetapkan. Dari skala penilaian capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat berhasil. Pencapaian nilai tersebut mengalami peningkatan 2,25 nilai dari pencapaian di tahun sebelumnya dimana

Kecamatan Panekan mendapatkan nilai 87,25 dalam penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Magetan.

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Kecamatan Panekan

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Panekan Indikator : Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	1.067.676.600	1.051.666.785	90,3	83	86,2	103
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Outcome : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lembaga Masyarakat serta aparatur desa wilayah Kecamatan Panekan Indikator : Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.621.300	16.549.100	99,57	100	100	100
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Output : Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan Indikator : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	16.621.300	16.549.100	99,57	2	2	100
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator : Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan//dokumen	16.621.300	16.549.100	99,57	5	5	100
1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcome : meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Panekan Indikator : Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	24.012.100	23.939.000	99,70	100	100	100

1.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Output : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif Indikator : Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa // Kegiatan	24.012.100	23.939.000	99,70	12	12	100
1..2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan//laporan	24.012.100	23.939.000	99,70	8	8	100
1.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Outcome : terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Panekan Indikator : Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	97.177.500	95.690.480	89,03	100	100	100
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Output : Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca) Indikator : Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perdamaian yang dilaksanakan secara efektif//kegiatan	97.177.500	95.690.480	89,03	12	12	100
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan//laporan	97.177.500	95.690.480	89,03	12	12	100
1.4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan Panekan secara partisipatif Indikator : Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Money Terpaku Minimal 80 // persen	15.393.000	15.366.500	92,45	100	100	100
1..4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output : terlaksananya tahapan	15.393.000	15.366.500	92,45	12	12	100

	perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas Indikator : Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa// Kegiatan						
1.4.1.1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa//dokumen	15.393.000	15.366.500	92,45	16	16	100
1.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Outcome : meningkatnya kualitas kinerja kelurahan Indikator : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan // Persen	914.472.700	900.121.705	98,43	100	100	100
1.5.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Output : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif Indikator : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat // Kegiatan	914.472.700	900.121.705	98,43	100	100	100
1.5.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun/unit	551.900.000	544.225.850	98,61	3	3	3
1.5.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	357.542.000	351.168.255	98,22	4	4	4
1.5.1.3	Evaluasi Kelurahan Indikator : Jumlah evaluasi kelurahan//laporan	5.030.700	4.727.600	93,97	4	4	4
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	2.628.886.693	2.228.142.231	94,88	85	87,25	102
2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan	2.195.185.993	2.076.147.151	94,60	80	80	100

	Panekan Indikator Program : Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan // Nilai						
2.1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	3.356.150	3.342.000	99,58	35	35	100
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	3.356.150	3.342.000	99,58	11	11	100
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah//dokumen	1.986.278.788	1.874.246.191	94,36	35	35	100
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	1.981.684.688	1.869.665.941	94,35	22	18	81
2.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan	4.594.100	4.580.250	99,7	32	32	100
2.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kegiatan : Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	64.193.191	62.722.098	97,71	12	12	100
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.026.000	5.025.500	99,99	5	5	100

	Paket						
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	9.559.341	9.421.750	98,56	12	12	100
2.1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	7.411.900	7.328.200	98,87	8	8	100
2.1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.272.500	3.245.000	99,16	12	12	100
2.1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.403.450	1.398.500	99,65	12	12	100
2.1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator : Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan//dokumen	2.520.000	1.800.000	71,43	12	12	100
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	35.000.000	34.503.148	96,88	20	20	100
2.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bulan	71.619.000	69.383.762	96,88	12	12	100
2.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	14.250.000	12.014.762	84,31	12	12	100
2.1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	4.400.000	4.400.000	100	12	12	100

2.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator : umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	52.969.000	52.969.000	100	13	13	100
2.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bulan	69.738.864	66.453.100	95.29	12	12	100
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Kinerja Kegiatan :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	51.997.784	48.725.600	93.71	6	6	100
2.1.5.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Kinerja : Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi Unit	17.741.080	17.727.500	99.92	6	6	100
2.2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Panekan Indikator Kinerja : Program Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan // Nilai	433.700.700	381.489.901	87.96	100	100	100
2.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kegiatan : Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	80.789.300	77.159.000	95.51	12	12	100
2.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan	7.341.100	7.340.500	99.99	1	1	100

	Perangkat Daerah Indikator Kinerja :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket						
2.2.1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	35.878.200	34.850.500	97.14	4	4	100
2.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	6.750.000	6.271.000	92.9	1	1	100
2.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.800.000	7.634.000	97.87	2	2	100
2.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10.500.000	9.863.000	93.93	1	1	100
2.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator : Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan//dokumen	2.520.000	1.950.000	77.38	12	12	100
2.2.1.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	10.000.000	9.250.000	92,5	3	3	100
2.2.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bulan	253.711.400	207.367.901	81.73	12	12	100
2.2.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	7.455.400	5.348.901	71.75	12	12	100
2.2.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator : umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	246.256.000	202.019.000	82.04	12	12	100

2.2.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Panekan Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bulan	99.200.000	96.963.000	97.74	12	12	100
2.2.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Kinerja Kegiatan :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	1.200.000	350.000	29.17	4	3	75
2.2.3.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Kinerja : Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi Unit	98.000.000	96.613.000	98.58	1	1	100

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	71	82,52	116	82,6	82,6	100	83	86,2	103
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	71	82,52	116	82,6	82,6	100	83	86,2	103
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	75	83,53	111	84,75	84,70	99,9	85	87,25	102
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Panekan	71	82,52	116	82,6	82,6	100	83	86,2	103

Panekan										
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	75	83,53	111	84,75	84,70	99,9	85	87,25	102

Pada tahun 2025 secara umum capaian realisasi target kinerja sudah tercapai. Tetapi ada beberapa program yang tidak dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh perubahan dokumen Renstra Kecamatan yang belum diikuti dengan dokumen-dokumen yang lainnya.

Faktor penghambat dalam pengelolaan administrasi di Kecamatan Panekan karena :

- i. Kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola administrasi.
- ii. Kurangnya koordinasi antar seksi/bidang dalam merencanakan program, melaksanakan program dan evaluasi pelaksanaan program.

Upaya selanjutnya untuk mencapai pengelolaan administrasi di Kecamatan Panekan yaitu :

- a. Perlunya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Panekan.
- b. Selalu melakukan koordinasi dengan seksi/bidang dalam merencanakan program, melaksanakan program yang telah direncanakan, melakukan evaluasi dan monitoring sesuai program yang telah direncanakan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	86,2	83	103
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	87,25	85	102

Pada Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan target 83 realisasi 86,2 sehingga tercapai 103 % dengan demikian target tercapai dengan maksimal.

Pada indikator kinerja, nilai sapip kecamatan Panekan target 85 realisasi 87,25 sehingga tercapai 102% dengan demikian target tercapai secara maksimal. Upaya yang akan kami lakukan lebih meningkatkan kinerja agar bisa tercapai realisasinya sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain (Bila Ada)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
		NIHIL			

Untuk perbandingan realisasi capaian nasional/provinsi/internasional tidak ada karena Ketiadaan Standar Baku (Standardisasi) yang Setara untuk Level Kecamatan dan Keterbatasan Akses Data Publikasi Kabupaten/Kota Lain

5. Analisa penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Tabel 3.8

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83	86,2	103	Pencapaian Kinerja masih kurang maksimal dari penilaian aspek EKK, yaitu : 1. Aspek penyelenggaraan pemerintahan umum 2. Aspek Inovasi/kretivitas

					Kecamatan 3. Aspek perencanaan dan penganggaran Kecamatan 4. Aspek penyelenggaraan atribut
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85	87,25	102	Pencapaian Kinerja masih kurang maksimal dari penilaian SAKIP, diantaranya 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja

Dari Sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan, Nilai EKK Kecamatan Panekan dari target 83 realisasi sebesar 86,2 % sehingga terojcapai 103 %, dari hasil tersebut target sudah tercapai.

Sedangkan untuk Sasaran Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan, Nilai SAKIP Kecamatan Panekan target 85 realisasi 87,25 sehingga tercapai 102%, dari hasil tersebut target sudah tercapai.

Faktor Penyebab Keberhasilan:

Kepatuhan Administratif : Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian SAKIP telah disusun dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Komitmen Penyelenggaraan: Adanya keseriusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sehingga realisasi nilai 86,2 % secara konsisten berada di atas target yang ditentukan sebesar 83 % dan realisasi nilai 87,25 berada diatas target yang ditentukan sebesar 85 %.

Analisis Kegagalan atau Kendala Kinerja :

Meskipun secara angka target tercapai (melampaui 100%), terdapat catatan kritis pada kolom penyebab yang menunjukkan adanya celah kualitas atau kendala internal:

Aspek Pemahaman SDM : Masih ada aparatur yang belum sepenuhnya memahami substansi dari dokumen SAKIP tersebut.

Risiko Keberlanjutan : Keberhasilan yang hanya bersandar pada pemenuhan petunjuk tanpa pemahaman yang mendalam berisiko membuat implementasi akuntabilitas hanya bersifat formalitas (administratif) semata, bukan menjadi budaya kerja.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	Kurangnya SDM yang kompeten	1. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan profesional dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan 2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis (Bimtek) internal secara lebih intensif agar seluruh staf tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban pengisian dokumen, tetapi benar-benar paham esensi dari manajemen kinerja tersebut.

Uraian penjelasan tabel :

Pada bab 1 tabel 1.1 rencana kebutuhan dan realisasi pegawai : Jabatan Fungsional Umum kebutuhan 1 (satu) orang realisasi 0 (nol), Pengolah Data dan informasi kebutuhan 1 (satu) orang realisasi 0 (nol) orang, Pengadministrasi Perkantoran kebutuhan 1 (satu) orang realisasi 0 (nol), sehingga tidak dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan

B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.10
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	86,2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	94,95	2.458.087.052	Menunjang
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	87,25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	99,57	16.621.300	Menunjang

Uraian penjelasan tabel:

Penyerapan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kurang maksimal karena PPTK kurang adanya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan, sehingga tujuan sasaran organisasi tidak sesuai dengan perencanaan, sedangkan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik cukup baik dalam penyerapannya karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan tujuan sasaran organisasi yang direncanakan

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83	86,2	103	2.628.886.693	2.458.087.052	93,5	9,96
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85	87,25	102	16.621.300	16.549.100	99,57	2,99

Secara keseluruhan nilai efisiensi yang diperoleh Kecamatan Panekan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 6,47 %. Nilai efisiensi paling rendah sebesar 2,99 % pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan, sedangkan nilai yang paling tinggi diperoleh sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Panekan dengan indikator Predikat Kinerja Kecamatan Panekan sebesar 9,96 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Kecamatan Panekan.

Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?

Apabila berdasarkan PMK No.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})}$$

Efisiensi total =

$$((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\Sigma((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\Sigma((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\%$$

$$= 26\%$$

www.jdih.kemenkeu.go.id

D. INOVASI TAHUN 2025

- (0)

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

- (0)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Panekan yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan

Sasaran ke-1.terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94,95% (Berhasil);

- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target./ Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94.95 % (kategori Berhasil)

- Sasaran ke-1 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 94.95 % (Kategori Berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.57% (kategori Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu.) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target./ Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,57 % (kategori Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,57 % (kategori Berhasil).

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83 Nilai	86,2 Nilai	103
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85 Nilai	87,25 Nilai	102
Capaian Kinerja				102
				Sangat Berhasil

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 2(dua) sasaran tersebut, secara umum telah/belum mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 94,95 % dengan serapan anggaran sebesar Rp 3.509.753.837,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 5,05 %.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024. Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya serapan anggaran pada tahun 2025.

Serapan anggaran tahun 2025 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 94,95 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya serapan anggaran Kecamatan di kegiatan Penyediaan Gaji ASN (pejabat struktural kecamatan/kelurahan kosong karena pensiun) sedangkan untuk Kelurahan di kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Kelurahan masih kurang (Tagihan Listrik menyesuaikan pemakain dan Jasa pelayanan umum untuk tenaga Non ASN berkurang karena ada 3 pegawai masuk PPPK)

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya Kualits Pelayanan Publik dan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Panekan	Indek Kepuasan Masyarakat	Melakukan survei secara rutin dan periodik (per semester atau per kuartal) untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat terkait layanan di Kecamatan.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatkan nilai EKK Kecamatan Panekan , terutama pada 1) Aspek Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum , 2) Penyelenggaraan Tugas Atributif , 3) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian dan 4) Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Panekan atas dasar pencapaian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja internal Kecamatan dengan memaksimalkan hasil tahun 2025 sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan kinerja dn pengendalian kinerja tahun 2026

Atas rencana aksi tersebut, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	93	93
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	-	-	-	86,5	86,5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	-	-	-	87,5	87,5

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Panekan, 27 Februari 2026

CAMAT PANEKAN





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN PANEKAN

Jalan Raya Panekan KM 6 KODE 63352, Telpn (0351) 895010

Email : kecamatan.panekan@gmail.com

Website : panekankec@magetan.go.id

PANEKAN

KEPUTUSAN CAMAT PANEKAN

Nomor : 188 / 02 / Kept / 403.408 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN
PANEKAN

TAHUN 2025

CAMAT PANEKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Panekan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP pada Kecamatan Panekan;
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Panekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Panekan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini untuk :

- a. melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kecamatan Panekan;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Perjanjian Kinerja;
 - 3) Pengukuran Kinerja;
 - 4) Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5) Pelaporan Kinerja;
 - 6) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa/Kelurahan
 - 7) Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

- KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Panekan Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panekan
Pada tanggal : 6 Januari 2025



YANU HARI WIBOWO, S.STP

Lampiran : Keputusan Camat Panekan
Nomor :188/03/403.408/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KECAMATAN KABUPATEN PANEKAN
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PERSONIL
1	2	3	4
1.	Ketua	Camat	Yanu Hari Wibowo, S.STP
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Hepta Wahyu Setiarso, S.STP, MM
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Nanang Aryono, S.Sos
		2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yogi Sasongko, ST
		3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Yogi Sasongko, ST
		4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Rachmad Soewastono, S.Sos
		5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Agus Suprianto, Amd
		6. Kasubag Keuangan dan PEP	G. Hartoto, S.Sos
		7. Pengadministrasi Keuangan	Lanjar Waluyo
		8. Bendahara Pengeluaran	Widya Septi Pratiwi, Amd

Ditetapkan di : Panekan
Pada tanggal : 6 Januari 2025


CAMAT PANEKAN
YANU HARI WIBOWO, S.STP

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Panekan

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM//KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan : Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah		Nilai indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			Kecamatan Panekan		pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi		
				Terlaksananya, Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kegiatan ; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan Panekan		- Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan - Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi dan	- Jumlah fasilitasi layanan sosial,	Kegiatan ;	

				koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	pembangunan SDM, serta penanganan bencana	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	- Jumlah Sarana prasarana umum kelurahan yang terpelihara - Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif dibina, Skor IKM Kelurahan Panekan, - Jumlah pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah, Persentase masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam program sosial	Kegiatan ; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub.Kegiatan ; Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terkelolanya Pokmas dan Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panekan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub.Kegiatan ; Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana prasarana kelurahan yang terbangun	Sub.Kegiatan ; Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	
				Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Panekan		Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya kamtibmas, penegakan	Jumlah kegiatan kamtibmas, penegakan	Kegiatan ;	

				peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Dokumen Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Panekan		Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan ; Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

				Tersedianya Dokumen Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub.Kegiatan ; Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan			Nilai SAKIP		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Panekan		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Panekan	Jumlah dokumen perencanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	1Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Kegiatan ; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Adminstrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sub.Kegiatan ; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah padaperangkat daerah	Kegiatan ; Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	

				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	
				Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan) Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah (Kelurahan)	Kegiatan ; Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Kantor Kecamatan Panekan dan Kelurahan Panekan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik	Sub.Kegiatan ;	

					Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub.Kegiatan ; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan) Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan	Kegiatan ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan Terpemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Unit yang Dipelihara	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Sub.Kegiatan ; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Dipelihara/Direhabil itasi		
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Kecamatan Panekan

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPU T	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome : " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Panekan"	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan	80 Nilai	80 Nilai	-											
	1. Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	82 indeks			86 indeks 97 %	2.309.090.690	86,2 indeks 97,8 %	2.537.585.976	86,4 indeks 98 %	2.778.547.623	86,6 indeks 98,3 %	2.991.323.826	87 indeks 98,5 %	3.223.231.416	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Output : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monetoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Panekan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	35 Dokume n	-	35 Dokume n	6.500.000	35 Dokume n	6.825.000	35 Dokume n	7.200.000	35 Dokume n	7.560.000	35 Dokume n	7.950.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	11 Dokume n	-	35 Dokume n	6.500.000	35 Dokume n	6.825.000	35 Dokume n	7.200.000	35 Dokume n	7.560.000	35 Dokume n	7.950.000	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah															
Administrasi Keuangan Perangkat daerah Output : Terlaksananya Penatausahaan Adminstrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenAdministrasi Keuangan Perangkat daerah	35 Dokumen	35 Dokumen	-	35 Dokumen	2.080.988.160	35 Dokumen	2.288.761.976	35 Dokumen	2.517.330.673	35 Dokumen	2.718.501.126	35 Dokumen	2.935.766.416	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan	20 orang/bulan	280 Orang	-	280 orang	2.074.488.160	280 orang	2.278.936.976	280 orang	2.507.130.673	280 orang	2.707.941.126	280 orang	2.924.816.416	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Output : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	25 Laporan	32 Laporan	-	32 Laporan	6.500.000	32 Laporan	6.825.000	32 Laporan	7.200.000	32 Laporan	7.560.000	32 Laporan	7.950.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Output Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	
Penatusahaan Barang Mili Daerah pada Perangkat Daerah Output : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	
Administrasi Umum Perangkat daerah Output : Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	108.320.000	12 Bulan	116.360.000	12 Bulan	122.166.000	12 Bulan	128.076.000	12 Bulan	134.990.000	
Penyedaiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	5 Paket	-	12 Paket	6.500.000	12 Paket	6.825.000	12 Paket	7.200.000	12 Paket	7.560.000	12 Paket	7.950.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	40.000.000	12 Paket	42.000.000	12 Paket	44.100.000	12 Paket	46.305.000	12 Paket	48.650.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	-	12 Paket	8.000.000	12 Paket	8.400.000	12 Paket	8.820.000	12 Paket	9.261.000	12 Paket	9.750.000	
Penyediaan bahan Logistik Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	3.500.000	12 Paket	3.675.000	12 Paket	3.900.000	12 Paket	4.000.000	12 Paket	4.200.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	2.800.000	12 Paket	2.940.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.150.000	12 Paket	3.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.646.000	12 Dokumen	2.800.000	12 Dokumen	2.940.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	12 Laporan	20 Laporan	-	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	58.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Output : Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	49.282.530	12 Bulan	50.339.000	12 Bulan	52.785.950	12 Bulan	53.935.950	12 Bulan	57.125.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12.743.530	12 Laporan	13.400.000	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	14.700.000	12 Laporan	15.435.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	6.600.000	12	7.000.000	12	7.350.000	12	7.800.000	12	8.190.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 V	-	13 Laporan	29.939.000	13 Laporan	29.939.000	13 Laporan	31.435.950	13 Laporan	31.435.950	13 Laporan	33.500.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	75.300.000	12 Bulan	79.065.000	12 Bulan	83.250.750	1 Bulan 2	87.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit	-	4 Unit	46.000.000	5 Unit	48.300.000	5 Unit	50.715.000	5 Unit	53.250.750	5 Unit	55.900.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	-	4 Unit	18.000.000	4 Unit	27.000.000	4 Unit	28.350.000	4 Unit	30.000.000	4 Unit	31.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Panekan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	-											
	1. Nilai indeks Pelayanan Publik 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi				2,5 Indeks 100 %	15.000.000	2,6 Indeks 100 %	16.000.000	2,8 Indeks 100 %	18.000.000	2,9 Indeks 100 %	20.000.000	3 Indeks 100 %	22.000.000	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya, Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	-	12 Kegiatan	15.000.000	12 Kegiatan	16.000.000	12 Kegiatan	18.000.000	12 Kegiatan	20.000.000	12 Kegiatan	22.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5 Dokumen	-	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan	100 Nilai	100 Nilai	-											
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan Panekan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial				100 %	35.000.000	100 %	36.750.000	100 %	38.587.500	100 %	40.516.875	100 %	42.542.720	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Output : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	7 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	35.000.000	12 Kegiatan	36.750.000	12 Kegiatan	38.587.500	12 Kegiatan	40.516.875	12 Kegiatan	42.542.720	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output : Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah	12 Laporan	8 Laporan	-	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	36.750.000	12 Laporan	38.587.500	12 Laporan	40.516.875	12 Laporan	42.542.720	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	-											
Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Panekan	Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	-			100 %	101.384.200	100 %	104.425.726	100 %	107.558.500	100 %	109.709.670	100 %	111.903.863	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Output : Terlaksananya kamtibmas, penegakan peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopimca	-	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	101.384.200	Kegiatan 12	104.425.726	12 Kegiatan	107.558.500	12 Kegiatan	109.709.670	12 Kegiatan	111.903.863	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ouput : Tersedianya Dokumen Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	101.384.200	12 Laporan	104.425.726	12 Laporan	107.558.500	12 Laporan	109.709.670	12 Laporan	111.903.863	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80 %	80 %	-											
Outcome Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Panekan	1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan				70 % 100 %	16.492.500	74 % 100 %	17.800.000	76 % 100 %	18.690.000	78 % 100 %	19.624.500	80 % 100 %	20.605.725	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Ouput : Terlaksananya Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa serta	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	6 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	16.492.500	12 Kegiatan	17.800.000	12 Kegiatan	18.690.000	12 Kegiatan	19.624.500	12 Kegiatan	20.605.725	

pembangunan wilayah yang berkualitas															
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output : Tersedianya Dokumen kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	16 Dokumen	-	12 Dokumen	16.942.500	12 Dokumen	17.800.000	12 Dokumen	18.690.000	12 Dokumen	19.624.500	12 Dokumen	20.605.725	
KELURAHAN PANAKAN															
BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPU T	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA outcome: " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi public yang efektif dan efisien pada Kelurahan Panekan"	Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan	80 Nilai	80 Nilai	-											
	Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan				80,5 Indeks	320.850.000	80,7 Indeks	339.610.000	82 Indeks	359.229.000	84 Indeks	372.983.790	86 Indeks	387.542.020	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Penatusahaan Barang Mili Daerah pada Perangkat Daerah Output : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Tingkat Kelurahan Panekan	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	66.650.000	12 Bulan	70.900.000	12 Bulan	75.097.500	12 Bulan	79.390.000	12 Bulan	83.927.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	-	12 Paket	7.300.000	12 Paket	7.665.000	12 Paket	8.500.000	12 Paket	8.925.000	12 Paket	9.450.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ouput : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	-	12 Paket	25.000.000	12 Paket	26.250.000	12 Paket	27.570.000	12 Paket	29.250.000	12 Paket	30.750.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	12 Paket	6.750.000	12 Paket	7.250.000	12 Paket	7.650.000	12 Paket	8.250.000	12 Paket	8.650.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	12 Paket	7.800.000	12 Paket	8.190.000	12 Paket	8.650.000	12 Paket	9.150.000	12 Paket	9.607.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	-	12 Paket	10.500.000	12 Paket	11.150.000	12 Paket	11.707.500	12 Paket	12.295.000	12 Paket	12.950.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	12 Laporan	3 Laporan	-	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.875.000	12 Laporan	8.500.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	10.000.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	215.800.000	12 Bulan	226.590.000	12 Bulan	237.919.500	12 Bulan	242.880.590	12 Bulan	247.950.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.300.000	12 Laporan	6.615.000	12	6.950.000	12	7.300.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	209.800.000	12 Laporan	215.290.000	12 Laporan	226.304.500	12 Laporan	230.930.590	12 Laporan	235.650.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	42.120.000	12 Bulan	46.212.000	12 Bulan	50.713.200	12 Bulan	55.664.520	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	-	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya OUTPUT : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	37.200.000	1 Unit	40.920.000	1 Unit	45.012.000	1 Unit	49.513.200	1 Unit	54.464.520	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	89 %	100 %	-											
	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan				80 Nilai	861.150.000	80,5Nilai	904.207.500	82Nilai	949.430.000	84 Nilai	996.901.500	86 Nilai	1.046.746.650	

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Output : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	861.150.000	12 Bulan	904.207.500	12 Bulan	949.430.000	12 Bulan	996.901.500	12 Bulan	1.046.746.650	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 unit	3 unit	-	5 unit	550.000.000	6 unit	577.500.000	7 unit	606.375.000	7 unit	636.693.750	7 unit	668.528.500	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Output : Terkelolanya Pokmas dan Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panekan	Jumlah Jumlah Pokmas dan Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	-	3 Pokmas/Ormas	302.000.000	5 Pokmas/Ormas	317.100.000	6 Pokmas/Ormas	332.955.000	6 Pokmas/Ormas	349.602.750	6 Pokmas/Ormas	367.082.900	
Evaluasi Kelurahan Output : Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	-	12 Laporan	9.150.000	12 Laporan	9.607.500	12 Laporan	10.100.000	12 Laporan	10.605.000	12 Laporan	11.135.250	

Tabael 3.3
Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024 Kecamatan Panekan

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								(KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS))	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)			
UNSUR WILAYAH							3.524.079.649	3.733.453.649	4.051.528.112	527.448.463			4.068.440.780
KECAMATAN PANEKAN							2.154.101.549	2.363.475.549	2.681.550.012	527.448.463			2.654.523.380
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan Angka	80	80	Kec. Panekan	Kec. Panekan	2.029.411.049	2.198.788.349	2.524.756.362	495.345.313	Menyesuiakan anggaran dengan adanya kenaikan gaji dan pegawai yang pensiun serta kebutuhan kegiatan belanja	80	2.458.385.680

7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	35	35	Kec Panekan	Kec Panekan	8.118.800	6.618.800	7.277.450	-841.350	Menyesuaikan kebutuhan	35	6.348.700
7.01.01 2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	8	8	Kec Panekan	Kec Panekan	8.118.800	6.618.800	7.277.450	-841.350	Menyesuaikan kebutuhan	8	6.348.700
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenAdmini strasi Keuangan Perangkat daerah Dokumen	35	35	Kec Panekan	Kec Panekan	1.691.304.549	1.858.178.549	2.176.253.012	484.948.463	Menyesuiakan anggaran dengan adanya kenaikan gaji dan pegawai yang pensiun	35	2.175.750.012
7.01.01. 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan	20	280	Kec Panekan	Kec Panekan	1.679.101.549	1.848.475.549	2.166.550.012	487.448.463	Menyesuiakan anggaran dengan adanya kenaikan gaji dan pegawai yang pensiun	280	2.166.550.012
7.01.01. 2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semester an SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran Laporan	25	25	Kec Panekan	Kec Panekan	12,203,000	9,703,000	9,703,000	-2.500.000-		25	9.200.000

7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	153.237.700	150.007.700	151.507.700	-1.730.000	Menyesuaikan kebutuhan	12	112,407,481
7.01.01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Peneran gan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	1	4	Kec Panekan	Kec Panekan	5,142,500	5,142,500	5,142,500	-	-	4	4.869.750
7.01.01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket	1	4	Kec Panekan	Kec Panekan	44,828,800	44,828,800	46.328.800	1.500.000	Menyesuaikan kebutuhan	4	14.459.781
7.01.01. 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	4	Kec Panekan	Kec Panekan	15,780,800	15,780,800	15,780,800	-	-	4	6.473.650
7.01.01. 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	1	4	Kec Panekan	Kec Panekan	3,485,600	3,485,600	3,485,600	--	--	4	3.272.500
7.01.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket	1	4	Kec Panekan	Kec Panekan	7,200,000	3,970,000	3,970,000	-3.230.000	Menyesuaikan kebutuhan	4	2.811.800
7.01.01. 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah Paket Dokumen Bacaan dan Paraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	--	--	12	2.520.000

7.01.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		--	12	78.000.000
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	86,750,000	97,280,000	100,742,873	13.992.873	Menyesuaikan kebutuhan	12	99.508.073
7.01.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sum ber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	12,400,000	12,400,000	13.784.800	1.384.800	Menyesuaikan kebutuhan	12	14.250.000
7.01.01. 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatandan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	6,100,000	6,100,000	6,100,000		Menyesuaikan kebutuhan	12	4.400.000
7.01.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	68,250,000	78,780,000	80.858.073	12.608.073	Meyesuaikan UMK Kabupaten Magetan	12	80.858.073
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bulan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	90,000,00	86,703,300	88.975.327	1.024.673	Menyesuaikan kebutuhan	12	64.371.414

7.01.01. 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	8	8	Kec Panekan	Kec Panekan	60,000,000	56,703,300	58.203.296	-1.796.704	Penambahan anggaran untuk BBM kendaraan Dinas	8	51.997.784
7.01.01 2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	5	5	Kec Panekan	Kec Panekan	30,000,000	30,000,000	30.772.031	772.031	Menyesuaikan keutuhan belanja	5	12.373.630
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan %	100	100	Kec Panekan	Kec Panekan	59,690,500	99,687,200	99,687,200	39.996.700	Menyesuaikan keutuhan belanja	100	130.179.600
7.01.02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	59,690,500	99,687,200	99,687,200	39.996.700	Menyesuaikan keutuhan belanja	12	130.179.600
7.01.02. 2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	49,000,000	88,996,700	88,996,700	39.996.700	Menyesuaikan keutuhan belanja	12	107.481.200
7.01.02 2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	7	7	Kec Panekan	Kec Panekan	10,690,500	10,690,500	10,690,500	--		7	22.698.400

07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan %	100	100	Kec Panekan	Kec Panekan	50,000,000	50,000,000	32.821.750	-17.178.250	Pengurangan karena kegiatan Festival Durian ditiadakan	100	49.337.500
7.01.03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	7	7	Kec Panekan	Kec Panekan	50,000,000	50,000,000	32.821.750	-17.178.250	Pengurangan karena kegiatan Festival Durian ditiadakan	7	49.337.500
7.01.03 2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan Laporan	12	12	Kec Panekan	Kec Panekan	50,000,000	50,000,000	32.821.750	-17.178.250	Pengurangan karena kegiatan Festival Durian ditiadakan	12	49.337.500
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan dengan nilai Monev 80 %	100	100	Kec Panekan	Kec Panekan	15,000,000	15,000,000	24.284.700	9.284.700	Menyesuaikann Kebutuhan kegiatan belanja	100	16.620.600
7.01.06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	6	6	Kec Panekan	Kec Panekan	15,000,000	15,000,000	24.284.700	9.284.700	Menyesuaikann Kebutuhan kegiatan belanja	6	16.620.600
7.01.06 2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	6	6	Kec Panekan	Kec Panekan	15,000,000	15,000,000	24.284.700	9.284.700	Menyesuaikann Kebutuhan kegiatan belanja	6	16.620.600

KELURAHAN PANEKAN							1,369,978,100	1,369,978,100	1,369,978,100				1.413.917.400
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kelurahan Panekan Angka	80	80	Kel. Panekan	Kel. Panekan	476,641,450	476,641,450	476,641,450	-		80	489.043.700
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah Bulan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	81,657,050	81,657,050	81,657,050	-		12	81.029.300
7.01.01 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Peneran gan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	1	1	Kel. Panekan	Kel. Panekan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-		1	7.341.100
7.01.01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	4	4	Kel. Panekan	Kel. Panekan	34,530,450	34,530,450	34,530,450	-		4	35.878.200
7.01.01 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	1	Kel. Panekan	Kel. Panekan	6,447,200	6,447,200	6,447,200	-		1	6.750.000
7.01.01 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	2	2	Kel. Panekan	Kel. Panekan	7,424,200	7,424,200	7,424,200	-		2	7.800.000
7.01.01 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	10,500,700	10,500,700	10,500,700	-		12	10.500.000

7.01.01 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	2,760,000	2,760,000	2,760,000	-	12	2.760.000
7.01.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	9.994.500	9.994.500	9.994.500	-	12	10.000.000
07.01. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bulan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	296,814,400	296,814,400	296,814,400	-	12	311.814.400
07.01.01 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	14,814,400	14,814,400	14,814,400	-	12	14.814.400
07.01.01 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	282,000,000	282,000,000	282,000,000	-	12	297.000.000
07.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bulan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	98,170,000	98,170,000	98,170,000	-	12	96.200.000
07.01.01 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	3	3	Kel. Panekan	Kel. Panekan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	3	1.200.000

07.01.01 2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi gedung	1	1	Kel. Panekan	Kel. Panekan	96,970,000	96,970,000	96,970,000	-	1	95.000.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan %	100	100	Kel. Panekan	Kel. Panekan	893,336,650	893,336,650	893,336,650	-	100	924.873.700
07.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kelurahan Kegiatan	12	12	Kel. Panekan	Kel. Panekan	893,336,650	893,336,650	893,336,650	-	12	924.873.700
07.01.03 2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun unit	5	5	Kel. Panekan	Kel. Panekan	501,343,000	501,343,000	501,343,000	-	5	522.593.000
07.01.03 003.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pok mas/Ormas	5	5	Kel. Panekan	Kel. Panekan	381,993,650	381,993,650	381,993,650	-	5	397.250.000
07:01: 2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan laporan	4	4	Kel. Panekan	Kel. Panekan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	4	5.030.700



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN

Jalan Raya Panekan Km. 6 Kode Pos 63352

Telp. 0351 – 895010

Email: kecamatan@panekan.go.id website: kecamatan@panekan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANU HARI WIBOWO, S.STP

Jabatan : CAMAT PANEKAN

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, SE, MM

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, SE, MM

Pihak Pertama,

YANU HARI WIBOWO, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP 198001211998101002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PANEKAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Panekan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.913.289.455	-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 22.698.400	-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 974.211.200	-
4.	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 107.481.200	-
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 16.620.600	-

Jumlah Rp 4.034.300.855

Magetan, 13 Januari 2025



Pj. BUPATI MAGETAN
ENIZHAMUL, SE, MM



KAMAT PANEKAN
YANU HARI WIBOWO, S.STP
 Pembina (IV/a)
 NIP 198001211998101002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN

Jl Raya Panekan km 6 Magetan Kode Pos 63352 Telp.(0351) 895010
Email : panekankec@magetan.go.id Webmail : panekankec.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANU HARI WIBOWO, S.STP

Jabatan : CAMAT PANEKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.,

Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



H. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

Magetan, 30 Juni 2025

Pihak Pertama,



YANU HARI WIBOWO, S.STP

Pemimpin (W/a)

NIP. 198001211998101002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN PANEKAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85 Nilai
2	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83 Nilai

No	Program	Anggaran	Ket
1.1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.717.690.115	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.033.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.2	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	937.863.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.3	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.177.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.4	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.622.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Bupati Magetan

HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

Magetan, 30 Juni 2025

CAMAT PANEKAN,



YANU HARI WIBOWO, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 198001211998101002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN

Jl. Raya Panekan km.6 Magetan, Jawa Timur 63352,
Telepon (0351) 895010

website: panekankec.magetan.go.id, email: panekan@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANU HARI WIBOWO, S.STP

Jabatan : CAMAT KECAMATAN PANEKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.,

Jabatan : BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Magetan, Januari 2026

Pihak Pertama



YANU HARI WIBOWO, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP.198001211998101002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN PANEKAN**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	83
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	87,3

No	Program	Anggaran	Ket
1.1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
1.2	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	969.500.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1.3	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.597.100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
1.4	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.325.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

No	Program	Anggaran	Ket
1.5	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.610.481.286	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Magetan, Januari 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN**

Jl. Raya Panekan km.6 Magetan, Jawa Timur 63352,
Telepon (0351) 895010

website: panekankec.magetan.go.id, email: panekan@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. MUH. SALIM

Jabatan : CAMAT KECAMATAN PANEKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.,

Jabatan : BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.



Ir. MUH. SALIM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.196905101997031004

Magetan, Juni 2026

Pihak Pertama,

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026
KECAMATAN PANEKAN**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	86,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	87,5

No	Program	Anggaran	Ket
1.1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
1.2	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	969.500.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1.3	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.597.100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
1.4	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.325.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

No	Program	Anggaran	Ket
1.5	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.833.946.286	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

Magetan, Juni 2026

Bupati Magetan



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.



CAMAT
KECAMATAN PANEKAN,

IE MUH. SALIM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.196905101997031004



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, TUJUAN/SASARAN DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10

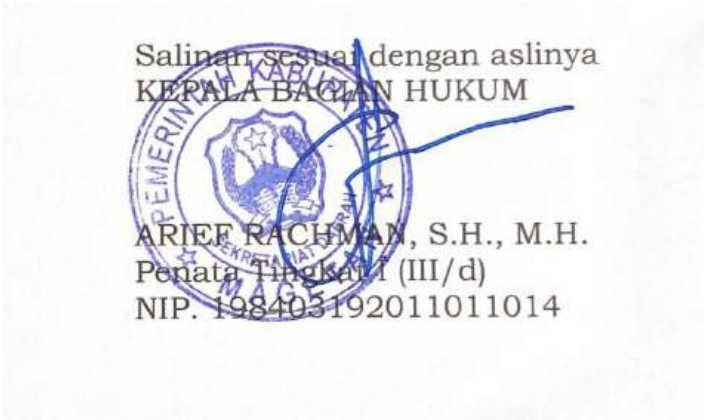
Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Magetan Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud digunakan untuk:
- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

VISI : Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan

MISI :

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat.
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, adaptif, dan transparan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan.
5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk menurunkan pengangguran.
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah.
7. Membangun Kehidupan masyarakat yang guyup rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan: Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dibentuk dari 3 dimen dasar Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengetahuan}} \times 100$	BPS	DINKES, RSUD dr. SAYIDIMAN MAGETAN, DPPKB PPPA, DLH dan PANGAN, DIKPORA
2.	Tujuan: Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Perhitungannya melibatkan pembobotan dari berbagai indikator di beberapa dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan religius. Indeks komposit seperti IHaI biasanya dihitung: 1. Identifikasi Dimensi dan Indikator: - IHaI dipecah menjadi beberapa dimensi utama (misalnya, Harmoni Ekonomi, Harmoni Sosial, Harmoni Budaya, Harmoni Religius).	Survey dan data sektoral instansi terkait	BAKESBANGPOL

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			- Setiap dimensi memiliki sejumlah indikator yang spesifik dan terukur (misalnya, tingkat toleransi antarumat beragama, partisipasi masyarakat dalam gotong royong, akses terhadap lapangan kerja, dll.). 2. Skoring/Normalisasi Data: - Data dari setiap indikator, yang bisa berasal dari survei (nilai 1-5, skala Likert, dll.) atau data sekunder (persentase, jumlah, dll.), akan dinormalisasi agar memiliki skala yang seragam. Normalisasi penting karena indikator-indikator memiliki unit dan rentang nilai yang berbeda. Metode normalisasi yang umum adalah mengubahnya ke skala 0-1 atau 0-100. 3. Pembobotan Indikator: - Setiap indikator dan/atau dimensi akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			kepentingannya dalam membentuk harmoni. Pembobotan ini biasanya ditentukan melalui diskusi para ahli (Delphi method), analisis statistik (misalnya, Analisis Komponen Utama/PCA), atau kebijakan. Bobot ini menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu indikator atau dimensi terhadap nilai IHaI keseluruhan		
3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infratstruktur	Indeks Infrastruktur Kabupaten adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu kabupaten, dihitung dari gabungan beberapa dimensi infrastruktur (transportasi, energi, air bersih & sanitasi, telekomunikasi, dan perumahan) yang dinormalisasi ke skala tertentu (misalnya 0–100) 1. Normalisasi setiap indikator ke skala 0–1 (atau 0–100).	KEMENTERIAN PUPR, BPS	DPUPR, DISHUB, DISKOMINFO, DISPERKIM

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Rata-ratakan indikator dalam satu dimensi → menghasilkan skor dimensi. 3. Hitung rata-rata (atau bobot tertentu) dari seluruh dimensi → menghasilkan Indeks Infrastruktur Kabupaten. KRITERIA PRASARANA SARANA Kondisi Jalan Kondisi Drainase Kondisi Air Bersih Kondisi Air Limbah Kondisi Persampahan Sangat buruk > 70% Buruk 50% - 70% Baik < 50% Genangan > 50% Genangan 25% - 50% Genangan < 25% Pelayanan < 30% Pelayanan 30% - 60% Pelayanan > 60% Pelayanan < 30% Pelayanan 30% - 60% Pelayanan > 60% Pelayanan < 50% Pelayanan 50% - 70% Pelayanan > 70% Nilai Bobot Nilai Tinggi Nilai Rendah 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 250 100 Hasil Indeks Skala 0 – 100 Kategori:		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			0–40 = Rendah 41–60 = Sedang 61–80 = Baik 81–100 = Sangat Baik		
4	Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Definisi Operasional - Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dihitung pada harga konstan. - Sektor pertanian mencakup: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan, sesuai klasifikasi lapangan usaha BPS. - Indikator ini mencerminkan laju perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah secara riil. Formulasi Perhitungan:	BPS	DTPHP, DISNAKKAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$\text{Pertumbuhan PDRB Pertanian}_t(\%) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$ Keterangan: PDRB_t = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian pada tahun t, harga konstan (year-on-year). PDRB_{t-1} = Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun sebelumnya. Catatan: Harus menggunakan PDRB harga konstan (ADHK) agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan karena inflasi/harga.		
5.	Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Definisi Operasional - Merupakan Indikator proxy dari Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata. - Indikator: Laju pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi, makan dan minum. - Definisi: Persentase peningkatan/penurunan nilai tambah bruto sektor akomodasi, makan dan minum dari satu periode ke periode berikutnya. - Cakupan sektor (berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha BPS – KBLI/ISIC): - Akomodasi (hotel, penginapan, guest house, homestay, dsb.)	BPS	DISBUDPAR, DISPERINDAG

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			- Penyediaan makan minum (restoran, rumah makan, katering, warung, café, dsb.) Formulasi Perhitungan : $\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum}_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: - PDRB_t= Nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun ke-t. - PDRB_t = Nilai PDRB ADHK sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun sebelumnya. - Hasil dalam persentase (%). - ADHK dipakai agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan pengaruh inflasi.		
6.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kabup ten/ Kata: 1. Menghitung komponen Indeks di Kabupaten/Kota, yang meliputi IKA,IKU, dan IKL; 2. Menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang diikalikan masing-	PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021	DLH DAN PANGAN

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			masing bobot dengan menggunaknn rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota. Formulasi perhitungan: $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ Keterangan: - IKA= Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan - Indeks sesuai kebijakan KLHK Nilai skala 0–100: semakin tinggi semakin baik.		
7.	Sasaran: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,	BPS	Dinas Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. $TPT (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Penganggur : Penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha baru. - Jumlah Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja yang bekerja + penganggur.		
8.	Sasaran: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan	Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro merupakan peningkatan jumlah total pendapatan kotor yang diperoleh koperasi dan UM Formula:	PD Pengampu Urusan Koperasi dan UM	DINKOP UKM

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	menumbuhkan kewirausahaan		$\frac{((\text{Nilai omset koperasi tahun } n - \text{nilai omset koperasi tahun sebelumnya}) / \text{Nilai omset tahun sebelumnya} \times 100\%) + ((\text{Nilai omset usaha mikro tahun } n - \text{nilai omset usaha mikro tahun sebelumnya}) / \text{Nilai omset tahun sebelumnya} \times 100\%)}{2}$		
9.	Tujuan: Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Adaptif dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Definisi Operasional: Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM dan perbaikan tata Kelola Pemerintahan Rumus Perhitungan : Penilaian atas implementasi kebijakan RB (immediate outcomes) oleh para Instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan RB (immediate outcomes) oleh Deputi RBKUNWAS selaku	KEMENPAN RB	SEKRETARIAT DAERAH dan SEMUA PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																
			koordinator (UPRBN) dan Kementerian/Lembaga yang menjadi leading institution kebijakan RB pada Tingkat meso <table><tr><th colspan="2">PENILAIAN</th><th>BOBOT</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>PEMDA</th></tr><tr><td colspan="3">RB GENERAL</td></tr><tr><td>A.</td><td>Capaian Sasaran Strategis</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif</td><td>26</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</td><td>24</td></tr><tr><td>B.</td><td>Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif</td><td>28</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</td><td>12</td></tr><tr><td>C.</td><td>Capaian Strategi Pelaksanaan RB General</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">Total RB General</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="3">RB TEMATIK</td></tr><tr><td>A.</td><td>Strategi Pelaksanaan RB Tematik</td><td>5</td></tr><tr><td>B.</td><td>Capaian Dampak RB Tematik</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">Total RB Tematik</td><td>20</td></tr><tr><td colspan="2">Total Nilai RB</td><td>120</td></tr></table>	PENILAIAN		BOBOT			PEMDA	RB GENERAL			A.	Capaian Sasaran Strategis	50		Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26		Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	24	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40		Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28		Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	12	C.	Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	10	Total RB General		100	RB TEMATIK			A.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	B.	Capaian Dampak RB Tematik	15	Total RB Tematik		20	Total Nilai RB		120		
PENILAIAN		BOBOT																																																			
		PEMDA																																																			
RB GENERAL																																																					
A.	Capaian Sasaran Strategis	50																																																			
	Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26																																																			
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	24																																																			
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40																																																			
	Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28																																																			
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	12																																																			
C.	Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	10																																																			
Total RB General		100																																																			
RB TEMATIK																																																					
A.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5																																																			
B.	Capaian Dampak RB Tematik	15																																																			
Total RB Tematik		20																																																			
Total Nilai RB		120																																																			
10.	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	BPS	DINSOS, DIKPORA, DINKES, DISPERKIM, DPUPR, DPMD, DINKOP UM, DISNAKER,																																																

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.		DTPHP, DISNAKKAN, DISPERINDAG

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Inspektorat Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Responsive, Adaptif, Dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantacuan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan: Meningkatnya pengawasan Internal menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen	LHE Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
			PENETAPAN TUJUAN		40.00%		
			Kualitas Sasaran Strategis	50.00%			
			Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%			
			SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%			
			STRUKTUR DAN PROSES		30.00%		
			Lingkungan Pengendalian				
			Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%			
			Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%			
			Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%			
			Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%			
			Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%			
			Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%			
			Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%			
			Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3.75%			

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pemerintah Terkait (1.8)				
			Penilaian Risiko				
			Identifikasi Risiko (2.1)	10%			
			Analisis Risiko (2.2)	10%			
			Kegiatan Pengendalian				
			Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%			
			Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%			
			Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%			
			Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%			
			Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%			
			Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%			
			Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%			
			Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%			
			Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%			
			Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%			

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Informasi dan Komunikasi				
			Informasi yang Relevan (4.1)	5%			
			Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%			
			Pemantauan				
			Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%			
			Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%			
			SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%			
			PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%		
			Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi				
			Capaian <i>Outcome</i>	15%			
			Capaian <i>Output</i>	15%			
			Keandalan Pelaporan Keuangan				
			Opini LK	25%			
			Pengamanan atas Aset				
			Keamanan Administrasi	10%			
			Keamanan Fisik	5%			
			Keamanan Hukum	10%			
			Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan				
			Temuan Ketaatan	20%			
			SUB JUMLAH HASIL	100.00%			
			TOTAL BOBOT		100.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	No.	Pilar / Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar		
			1	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48.00 %		
				Kebijakan Antikorupsi	9.60 %			
				Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20 %			
				Dukungan Sumber Daya	7.20 %			
				Power (Kuasa & Wewenang)	14.40 %			
				Pembelajaran Antikorupsi	9.60 %			
			2	PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36.00 %		
				Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00 %			
				Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3.60 %			
				Kepemimpinan Etis	9.00 %			
				Integritas Organisasi	7.20 %			
				Iklim Etis Prinsip	7.20 %			
			3	PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Investigasi	8.00 %			
				Tindakan Korektif	8.00 %			
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	No.	Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen		
			1	PERENCANAAN		40.00 %		
				Kualitas Perencanaan	40.00 %			
			2	KAPABILITAS		30.00 %		
				Kepemimpinan	5.00 %			
				Kebijakan Manajemen Risiko	5.00 %			
				Sumber Daya Manusia	5.00 %			
				Kemitraan	2.50 %			
				Proses Manajemen Risiko	12.50 %			
			3	HASIL		30.00 %		
				Aktivitas Penanganan Risiko	18.75 %			
				Outcomes	11.25%			
				TOTAL BOBOT		100.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang	LHE SAKIP Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$	Laporan SKM Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Sekretariat Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Responsive, Adaptif, Dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
FUNGSI	: 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Pemantacuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai:	Inspektorat Daerah	Sekretaris Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter} \times 25}{\text{Jumlah parameter}}$ 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan SKM Setda	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsif, Adaptif, dan Transparan
TUGAS	: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
FUNGSI	: 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat	Dihitung dengan rumus : $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ Berikut 9 (Sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan SKM Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2.	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk	Inspektorat Daerah	Sekretaris DPRD

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai:		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan rumus: $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ Berikut 9 (Sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. blaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan SKM Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

NAMA INSTANSI	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Magetan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; 5. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB															
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN No. 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN Perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan komponen nilai : <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sinergi</td><td>32,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nilai Kualitas Perencanaan</td><td>58,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja</td><td>10,00</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Akhir</td><td>100,00</td></tr></table> Keterangan: A.Sinergi a) Keselarasan RPJMD dengan RPJMN/ RPJMD Provinsi b) Keselarasan RKPD dengan RKP/ RKPD Provinsi c) Kesesuaian APBD untuk membiayai program prioritas nasional berdasarkan kewenangan daerah B. Nilai Kualitas Perencanaan	No	Komponen	Bobot	1.	Sinergi	32,00	2.	Nilai Kualitas Perencanaan	58,00	3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10,00	Nilai Akhir		100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
No	Komponen	Bobot																		
1.	Sinergi	32,00																		
2.	Nilai Kualitas Perencanaan	58,00																		
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10,00																		
Nilai Akhir		100,00																		

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																		
			a) Kesesuaian isu strategis, target, program di RPJMD/ RKPD b) Inovasi Perencanaan Pembangunan C. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja a) Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja OPD																				
2.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Indikator yang mengukur seberapa besar kajian/ riset dan inovasi yang disusun memberikan rekomendasi/ kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan daerah Rumus: $\frac{\text{Jumlah Kajian/ Riset dan Inovasi yang Meningkatkan Kinerja Pembangunan}}{\text{Jumlah Seluruh Kajian/ Riset dan Inovasi}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai SAKIP	Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Komponen Perencanaan</td><td>30,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Komponen Pengukuran</td><td>30,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Komponen Pelaporan</td><td>15,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Akhir</td><td>100,00</td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	1.	Komponen Perencanaan	30,00	2.	Komponen Pengukuran	30,00	3.	Komponen Pelaporan	15,00	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	Nilai Akhir		100,00	Inspektorat Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
No	Komponen	Bobot																					
1.	Komponen Perencanaan	30,00																					
2.	Komponen Pengukuran	30,00																					
3.	Komponen Pelaporan	15,00																					
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00																					
Nilai Akhir		100,00																					

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Komponen Pelaporan yang dinilai : 1. Pelaporan kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan parameter yang diukur adalah: 1. Persyaratan	Laporan SKM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana Rumus perhitungan: $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah Indeks per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif, dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang menjadi Kewenangan Daerah
FUNGSI	1. Menyusun Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Melaksanakan Tugas Dukungan Teknis sesuai dengan Lingkup Tugasnya 3. Pemantacuan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Lingkupnya 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Magetan Ada empat kriteria utama yang menjadi dasar pemberian Opini oleh BPK : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Kecukupan Pengungkapan (Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dan memadai) 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Beberapa Kriteria Opini : 1. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 3. TW (Tidak wajar) 4. TMP (Tidak Memberi Pendapat)	BPK-RI	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$ Sumber-sumber Utama PAD : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (Sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, Komponen Pelaporan, yang dinilai:	Inspektorat Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	Pemerintah instansi/ mempunyai peta jabatan dan rencana kebutuhan ASN 5 Tahun dilengkapi Anjab Dan ABK	Aplikasi Pinter	Kepala BKPSDM
2.	Meningkatnya ASN yang memiliki predikat kinerja minimal baik	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal baik	$\left(\frac{\text{Jumlah ASN Yang Memiliki Predikat Kinerja Minimal Baik}}{\text{Jumlah ASN}} \right) \times 100$	Dokumen Penilaian kinerja	Kepala BKPSDM
3.	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	$\left(\frac{\text{Jumlah ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\text{Jumlah ASN}} \right) \times 100$	Dokumen Pengembangan Kompetensi	Kepala BKPSDM
4.	Meningkatnya Kepuasan Layanan Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk	Inspektorat Daerah	Kepala BKPSDM

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelavanoan 6. Kompetensi pelaksana	Laporan SKM BKPSDM	Kepala BKPSDM

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana		
5.	Meningkatnya penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan	Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan	$\left(\frac{\text{jumlah ASN yang mengalami perubahan karier sesuai pemetaan \& penempatan}}{\text{jumlah ASN existing}} \right) \times 100$	Dokumen peta jabatan	Kepala BKPSDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Kehidupan masyarakat yang guyup rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Magetan
FUNGSI	: 1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri; 3. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, dan kewaspadaan nasional; 4. Pelaksanaan kajian strategis di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan bidang politik dalam negeri; 5. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak azasi manusia; 6. Pelaksanaan Koordinasi bersama lembaga Instansi terkait dalam kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 7. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan badan; 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbedaan sara dan kehidupan berwawasan kebangsaan	Indeks Toleransi	Perhitungan Indeks $X = \sqrt[2]{XA \times XB}$ XA : Variabel Toleransi Antarumat Beragama XB : Variabel Toleransi Intraumat Beragama Definisi operasional : Alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam suatu masyarakat atau kelompok	Bapperida	Kepala Bakesbangpol
2.	Meningkatnya kebebasan kehidupan demokrasi dan kewaspadaan dini masyarakat	Persentase partai politik yang berperan meningkatkan demokrasi	Jumlah partai politik yang berperan meningkatkan demokrasi dibagi jumlah partai politik yang ada dikalikan seratus persen	Bakesbangpol	Kepala Bakesbangpol
3.	Meningkatnya kebebasan kehidupan demokrasi dan kewaspadaan dini masyarakat	Persentase konflik sosial yang berhasil ditangani	Jumlah konflik sosial yang berhasil ditangani dibagi jumlah potensi konflik sosial yang ada dikalikan seratus persen	Bakesbangpol	Kepala Bakesbangpol

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Kepala Bakesbangpol

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} : \frac{\text{Jumlah Indeks per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$	Laporan IKM Bakesbangpol	Kepala Bakesbangpol

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyub Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau
TUGAS	: 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
FUNGSI	: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Definisi Operasional: upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kotadan provinsi. Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB Formulasi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil dari pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga	BNPB	Kepala Pelaksana BPBD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan; - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja; - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja; - Bobot 25 komponen evaluasi. Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	Inspektorat Daerah	Kepala Pelaksana BPBD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika; 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap; 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan; 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya. Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP; 2. Keselarasan dokumen perencanaan; 3. Ketercapaian Kinerja; 4. LHE ditindaklanjuti; 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE. 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$	Laporan SKM BPBD	Kepala Pelaksana BPBD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
VISI	: Magetan Nyaman Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tentram, Berasaskan Nilai Agama dan Budaya Serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau
TUGAS	: 1. Menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati 2. Memelihara dan menyelenggarakan ketraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran
FUNGSI	: 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat 5. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), PPNS dan/atau aparaturnya 7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya 8. Pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 10. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

NO.	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan
		Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	$\frac{\text{Jumlah laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

NO.	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan; - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja; - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja; - Bobot 25 komponen evaluasi. Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	Inspektorat Daerah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan

NO.	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika; 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap; 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan; 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya. Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP; 2. Keselarasan dokumen perencanaan; 3. Ketercapaian Kinerja; 4. LHE ditindaklanjuti; 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjutt LHE. 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan. 2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Komponen Tingkat Kegemaran Membaca: 1. Frekuensi Membaca (TFM) 2. Durasi Membaca (TDM) 3. Jumlah Buku Dibaca (TJB) 4. Frekuensi Akses Internet (FAI) 5. Durasi Akses Internet (DAI) Rumus Perhitungan : $TGM = 0.3TFM + 0.3TDM + 0.3TJB + 0.5FAI + 0.5DAI$ Kategori Tingkat Kegemaran Membaca : 0 – 25,00 : Sangat Rendah 25,01 - 50,00 : Rendah 50,01 - 75,00 : Sedang 75,01 - 90,00 : Tinggi 90,01 - 100,00 : Sangat Tinggi	Laporan Akhir Kajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Oleh DISPERPUSIP PROVINSI JATIM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan arsip internal	Nilai pengawasan kearsipan internal	Komponen Pengawasan Arsip Internal : 1. Pengelolaan Arsip Dinamis : a. Pengendalian Naskah Dinas b. Penggunaan Arsip c. Pemeliharaan Arsip d. Penyusutan Arsip 2. Sumber Daya Kearsipan : a. SDM Kearsipan b. Prasarana dan Sarana Kearsipan Rumus Perhitungan : <u>Nilai rata - rata obyek pengawasan kearsipan internal</u>	Laporan Hasil Pengawasan Arsip Internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah obyek pengawasan kearsipan internal Kategori Pengawasan Arsip Internal: nilai > 90 – 100 kategori AA (sangat memuaskan) nilai > 80 – 90 kategori A (memuaskan) nilai > 70 – 80 kategori BB (sangat baik) nilai > 60 – 70 kategori B (baik) nilai > 50 – 60 kategori CC (cukup) nilai > 30 – 50 kategori C (kurang) nilai 0 – 30 kategori D (sangat kurang)		
3.	Meningkatnya kualitas pengawasan arsip eksternal	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Komponen Pengawasan Arsip Eksternal : 1. Aspek kebijakan 2. Aspek pembinaan 3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun 4. Aspek pengelolaan arsip statis 5. Aspek sumber daya kearsipan Rumus Perhitungan : Aspek kebijakan + Aspek pembinaan + Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun + Aspek pengelolaan arsip statis + Aspek sumber daya kearsipan = Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal Kategori Pengawasan Arsip Eksternal : nilai > 90 – 100 kategori AA (sangat memuaskan)	Laporan Hasil Pengawasan Arsip Eksternal Disperpusip Prov. Jatim	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			nilai > 80 – 90 kategori A (memuaskan) nilai > 70 – 80 kategori BB (sangat baik) nilai > 60 – 70 kategori B (baik) nilai > 50 - 60 kategori CC (cukup) nilai > 30 – 50 kategori C (kurang) nilai 0 - 30 kategori D (sangat kurang)		
4.	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	Nilai SAKIP : - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakan lanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	9 parameter SKM 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Indeks Per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter Kategori}} \times 25$ Penilaian SKM : 88,31 s/d 100 sangat baik (A) 76,30 s/d 88,30 baik (B) 65,00 s/d 76,60 kurang baik (C) 25,00 s/d 64,99 tidak baik (D)	Laporan SKM Dinas ARPUS	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Kemudahan Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS_a^t = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1 , ..., n) P_i^t = Jumlah penduduk usia t t = tahun data diambil saat penghitungan FK = Faktor koreksi	BPS	Kepala DINAS DIKPORA
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas	BPS	Kepala DINAS DIKPORA

			$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas x_i = Lama sekolah penduduk ke - i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas		
3.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Jumlah seluruh penghargaan yang diterima oleh pemuda di Kabupaten Magetan (Tingkat Provinsi dan Nasional selain bidang olahraga)	DINAS DIKPORA	Kepala DINAS DIKPORA
4.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah seluruh penghargaan yang diterima oleh atlet di Kabupaten Magetan (Tingkat Provinsi dan Nasional)	DINAS DIKPORA	Kepala DINAS DIKPORA
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1.Persyaratan 2.Sistem mekanisme dan prosedur 3.Waktu penyelesaian 4.Biaya/tarif 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan 6.Kompetensi pelaksana 7.Perilaku pelaksana 8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9.Sarana dan Prasarana	Laporan Hasil SKM Dinas Dikpora	Kepala DINAS DIKPORA

		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP -Bobot 30 komponen perencanaan -Bobot 30 komponen pengukuran kinerja -Bobot 15 komponen pelaporan kinerja -Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment,	Inspektorat Daerah	Kepala DINAS DIKPORA
--	--	-------------	--	--------------------	----------------------

			serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
--	--	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif, dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Aplikasi E SKM	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.	Sasaran: Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Ber KTP-el	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP E}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP El}} \times 100$ penduduk wajib KTP > 17 dan atau penduduk yang pernah/sudah menikah	Dispendukcapil	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100$	Dispendukcapil	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3.	Sasaran: Meningkatnya	Persentase Penduduk Usia	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100$	Dispendukcapil	Kepala Dinas Kependudukan

	Layanan Pencatatan Sipil	(0-18 Tahun) Berakta Kelahiran			Dan Pencatatan Sipil
4.	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kependudukan yang ada}}{\text{Jumlah Dokumen Kependudukan yang seharusnya ada}} \times 100$	Dispendukcapil	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5.	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

			Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
--	--	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Kesehatan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI 1	: Membangun Sumber Daya Manusia yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
TUGAS	: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	: 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesehatan 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan 4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kesehatan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase kabupaten yang memiliki fasilitas Kesehatan primer (80% desa di kab/kota memiliki min.1 Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan dan 80% puskesmas di kab/kota melayani $\leq 30K$ penduduk atau jarak tempuh ≤ 120 menit) dan lanjutan (minimal 1 RS dengan kompetensi pengampu layanan level madya untuk setiap kab/kot) sesuai kebutuhan. Cara Penghitungan: Jumlah Fasilitas Kesehatan sesuai standar merupakan penjumlahan dari Jumlah Unit Pelayanan Desa/Kelurahan ditambah Jumlah Puskesmas Kabupaten melayani $\leq 30K$ penduduk atau jarak tempuh ≤ 120 menit) ditambah Jumlah Rumah Sakit Kabupaten. - Jumlah Unit Pelayanan Desa/kelurahan - Jumlah Pustu = 59 unit - Jumlah Ponkesdes = 107 unit - Jumlah Polindes sesuai standar = 0 - Jumlah Puskesmas Kabupaten melayani $\leq 30K$ penduduk atau jarak tempuh ≤ 120 menit) = 11 Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit Kabupaten = 1 Rumah Sakit Jumlah seluruh Fasilitas Kesehatan Sesuai Kebutuhan:	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			((80% dari Jumlah Desa memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan(Pustu, Ponkesdes, Polindes)) + (80% Puskesmas) + (jumlah sakit kabupaten)) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar = $\frac{\text{Jumlah fasilitas kesehatan sesuai standar (Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan, Rumah Sakit)}}{\text{Jumlah seluruh Fasilitas Kesehatan Sesuai kebutuhan}} \times 100 \%$ <i>Sumber : Rencana Induk Bidang Kesehatan</i>		
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Labkesmas) dengan akreditasi paripurna Cara penghitungan: Jumlah total fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna: (Jumlah Puskesmas terakreditasi paripurna + Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna + Jumlah Labkesmas terakreditasi paripurna). Jumlah total fasilitas kesehatan = (Jumlah seluruh Puskesmas + Jumlah seluruh Rumah Sakit + Jumlah Labkesmas).	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna = $\frac{\text{Jumlah total fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna}}{\text{Jumlah total fasilitas kesehatan}} \times 100 \%$ <i>Sumber : Rencana Induk Bidang Kesehatan</i>		
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Cara Pengitungan: Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Angka Kematian Ibu = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu ----- x 100.000 Jumlah Kelahiran Hidup <i>Sumber : Rencana Induk Bidang Kesehatan</i>		
		Angka Kematian Balita	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi) Nilai normatif Angka Kematina Balita adalah sebagai berikut: - ≥140 = sangat tinggi - 71<AKBa<140 = tinggi - 20<AKBa<70 = sedang - ≤ 20 = rendah Cara Penghitungan: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000 Angka Kematian Balita =	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <0-4 tahun (0-59 bulan) pada waktu tertentu) ----- x 1.000 Jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama <i>Sumber : Rencana Induk Bidang Kesehatan</i>		
		Prevalensi Stunting	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD Cara perhitungan: Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PAB(5)P stunting = (JAB(5)P stunting/JAB(5)) *100% Keterangan: PAB(5) P stunting: Prevalensi anak balita yang masuk kategori pendek dan sangat pendek (stunting) JAB(5)P stunting: Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (stunting) pada waktu diukur JAB(5): Jumlah anak balita pada waktu diukur Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Prevalensi stunting = Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (stunting) pada waktu diukur ----- x 100% Jumlah anak balita pada waktu diukur <i>Sumber : Rencana Induk Bidang Kesehatan</i>		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan Publik Dinas Kesehatan		- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya <i>Sumber : Inspektorat Daerah</i>		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	9 (sembilan) Parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana Cara Penghitungan: Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ <i>Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan</i>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Komunikasi dan Informatika
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik dan tugas pembantuan.
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik; 3. Pelaksanaan evaluasi di bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik; 4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik; 5. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah, dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																		
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	(Hasil SAQ x 30%) + (Visitasi x 40%) + (Wawancara x 30%) dengan: 1. Bobot hasil SAQ (Self Assesment Quissionere) 30% Indikator penilaian SAQ (Self Assesment Quissionere): a) Kualitas Informasi dengan bobot nilai 20%; b) Jenis Informasi dengan bobot nilai 20%; c) Pelayanan Informasi dengan bobot nilai 20%; d) Komitmen Organisasi dengan bobot nilai 15%; e) Sarana dan Prasarana dengan bobot nilai 10%; f) Digitalisasi dengan bobot nilai 15%. 2. Bobot nilai Visitasi 30% 3. Bobot nilai Wawancara 30% 4. Zonasi pemeringkatan hasil dikelompokkan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Peringkat</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1.</td><td>Informatif</td><td>90 - 100</td></tr><tr><td>2.</td><td>Menuju Informatif</td><td>80 – 89,9</td></tr><tr><td>3.</td><td>Cukup Informatif</td><td>60 – 79,9</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang Informatif</td><td>40 – 59,9</td></tr><tr><td>5.</td><td>Tidak Informatif</td><td>< 39,9</td></tr></table>	No.	Peringkat	Nilai	1.	Informatif	90 - 100	2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	3.	Cukup Informatif	60 – 79,9	4.	Kurang Informatif	40 – 59,9	5.	Tidak Informatif	< 39,9	Hasil Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
No.	Peringkat	Nilai																					
1.	Informatif	90 - 100																					
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9																					
3.	Cukup Informatif	60 – 79,9																					
4.	Kurang Informatif	40 – 59,9																					
5.	Tidak Informatif	< 39,9																					

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																																					
2.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Pengguna = $\frac{n_k - n_b}{4}$ Keterangan: n_k = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat; n_b = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan risiko. Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat "Sangat Buruk" s.d. "Sangat Baik" dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini. Skala Penilaian Kepuasan Pengguna <table><tr><th colspan="5">Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Sangat Buruk</td><td>Buruk</td><td>Cukup</td><td>Baik</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Persepsi Biaya dan Risiko (b)</th></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>Sangat Buruk</td><td>Buruk</td><td>Cukup</td><td>Baik</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Net sum Persepsi (k - b)</th></tr><tr><td>-4</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk</td><td>(kondisi antara)</td><td>(kondisi netral)</td><td>(kondisi antara)</td><td>Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik</td></tr></table> Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi. Translasi Skala : Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34) (y) (Nilai Kondisi Tingkat Kematangan terendah) A (Nilai Kondisi Tingkat Kematangan tertinggi) B Nilai Kepuasan Pengguna (x) Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan $f(x)=ax+b$ atau $y = ax+b$ (Giuseppe Peano, 1888) Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital <table><tr><th>No</th><th>Nilai Kepuasan Pengguna</th><th>Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>< 2,4</td><td>1</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>2</td><td>-2,4 s.d. < - 0,8</td><td>2</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>3</td><td>-0,8 s.d. < 1</td><td>3</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>4</td><td>1 s.d. < 2,4</td><td>4</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>2,4 s.d. 4,0</td><td>5</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)					1	2	3	4	5	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	Persepsi Biaya dan Risiko (b)					5	4	3	2	1	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	Net sum Persepsi (k - b)					-4	-2	0	2	4	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik	No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat	1	< 2,4	1	Sangat Buruk	2	-2,4 s.d. < - 0,8	2	Buruk	3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup	4	1 s.d. < 2,4	4	Baik	5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik	KemenpanRB	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)																																																																										
1	2	3	4	5																																																																						
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik																																																																						
Persepsi Biaya dan Risiko (b)																																																																										
5	4	3	2	1																																																																						
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik																																																																						
Net sum Persepsi (k - b)																																																																										
-4	-2	0	2	4																																																																						
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik																																																																						
No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat																																																																							
1	< 2,4	1	Sangat Buruk																																																																							
2	-2,4 s.d. < - 0,8	2	Buruk																																																																							
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup																																																																							
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik																																																																							
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik																																																																							

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah Indeks per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Hasil SKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			(cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB														
4.	Terwujudnya layanan data statistik sektoral yang akurat	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik diperoleh dari penjumlahan nilai 5 Domain: 1. Prinsip Satu Data Indonesia, 2. Kualitas Data, 3. Proses Bisnis Statistik, . 4. Kelembagaan, 5. Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator $Indeks\ Pembangunan\ Statistik = \sum_{k=1}^K Bobot\ Domain_k \times Nilai\ Domain_k$ dengan: K adalah Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k; Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 10. Tabel 10. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan <table><tr><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td></tr><tr><td>4,2 - 5,0</td><td>MEMUASKAN</td></tr><tr><td>3,5 - < 4,2</td><td>SANGAT BAIK</td></tr><tr><td>2,6 - < 3,5</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>1,8 - < 2,6</td><td>CUKUP</td></tr><tr><td>< 1,8</td><td>KURANG</td></tr></table>	Nilai Indeks	Predikat	(1)	(2)	4,2 - 5,0	MEMUASKAN	3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK	2,6 - < 3,5	BAIK	1,8 - < 2,6	CUKUP	< 1,8	KURANG	BPS	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai Indeks	Predikat																		
(1)	(2)																		
4,2 - 5,0	MEMUASKAN																		
3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK																		
2,6 - < 3,5	BAIK																		
1,8 - < 2,6	CUKUP																		
< 1,8	KURANG																		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
5.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	$\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$ Dengan: Nilai indeks KAMI hasil verifikasi diperoleh dari penjumlahan skor 6 area : 1. Area Tata kelola Keamanan Informasi 2. Area Pengelolaan Risiko Pengamanan Informasi 3. Area Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi 4. Area Pengelolaan Aset Informasi 5. Area Teknologi dan Keamanan Informasi 6. Area Perlindungan Data Pribadi	BSSN	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah 5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun n dan meningkat volume usaha dan aset $\frac{\text{Jumlah total Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah total Koperasi Aktif}} \times 100 \%$ Koperasi aktif adalah koperasi yang secara rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya. Koperasi Berkualitas Adalah koperasi aktif yang melaksanakan RAT pada tahun n dan meningkat volume usaha serta assetnya	Laporan data Keragaan koperasi (Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi)	Kepala Dinas Koperasi UKM
2.	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	Jumlah usaha mikro yang naik kelas pada tahun n Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan maksimal Rp 300 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, yang menjadi bagian dari UMKM di Indonesia dan memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Usaha Mikro naik kelas Transformasi Usaha Mikro dengan meningkatkan berbagai aspek seperti kualitas produk, manajemen (keuangan,	Laporan keragaan usaha mikro (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro)	Kepala Dinas Koperasi UKM

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			SDM, operasional), inovasi, legalitas (NIB, izin), jangkauan pemasaran (digital, ekspor), sehingga memiliki daya saing kuat, kemandirian, serta potensi kontribusi lebih besar pada ekonomi nasional		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Koperasi UKM

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan hasil IKM Dinas Koperasi UKM	Kepala Dinas Koperasi UKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: 1. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan. 2. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan. 3. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pangan 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan pangan 3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan pangan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																														
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA\ Kab./Kota = \frac{\sum_i^n IKA\ Titik\ Pantau_i}{Jumlah\ Titik\ Pantau}$ Keterangan: Nilai IKA dihitung dari 8 parameter yaitu padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Nitrat (NO3-N), total fosfat (T-P) dan fecal coliform (Fecal Coli) $IKA\ Titik\ Pantau = \sum_i^n w_i I_i$ Faktor Pembobot masing-masing Parameter untuk perhitungan IKA <table><tr><th>No.</th><th>Parameter</th><th>Faktor Pembobot (w)</th></tr><tr><td>1.</td><td>pH</td><td>0,137</td></tr><tr><td>2.</td><td>BOD</td><td>0,133</td></tr><tr><td>3.</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr><tr><td>4.</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr><tr><td>5.</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr><tr><td>6.</td><td>NO3-N</td><td>0,081</td></tr><tr><td>7.</td><td>T-P</td><td>0,100</td></tr><tr><td>8.</td><td>Fecal Coli</td><td>0,157</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,000</td></tr></table> Sumber:Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian	No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)	1.	pH	0,137	2.	BOD	0,133	3.	COD	0,140	4.	TSS	0,086	5.	DO	0,167	6.	NO3-N	0,081	7.	T-P	0,100	8.	Fecal Coli	0,157	Total		1,000	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)																																	
1.	pH	0,137																																	
2.	BOD	0,133																																	
3.	COD	0,140																																	
4.	TSS	0,086																																	
5.	DO	0,167																																	
6.	NO3-N	0,081																																	
7.	T-P	0,100																																	
8.	Fecal Coli	0,157																																	
Total		1,000																																	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</i>		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$ Keterangan: - NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin - SO2 mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya - Particulate Matter 2,5 (PM2,5) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Baku Mutu INA: Baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan NO₂ = 50 µg/m³ SO₂ = 45 µg/m³ PM_{2,5} = 15 µg/m³ <i>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</i>		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<i>IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut</i> <i>$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$</i> <i>$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$</i> Keterangan: Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan (yang masuk ke dalam	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																																				
			kelas tutupan lahan) dan memasukkan faktor koreksi gambut. IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Faktor Koreksi Gambut Kab. Magetan = 0 (karena tidak memiliki lahan gambut) TL = Tutupan Lahan C = Koefisien Kelas Tutupan Lahan <table><tr><th>No.</th><th>Kelas Tutupan</th><th>Koefisien (C)</th></tr><tr><td>1</td><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td rowspan="3">1</td></tr><tr><td>2</td><td>Hutan Rawa Primer</td></tr><tr><td>3</td><td>Hutan Mangrove Primer</td></tr><tr><td>4</td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td rowspan="3">0.9</td></tr><tr><td>5</td><td>Hutan Rawa Sekunder</td></tr><tr><td>6</td><td>Hutan Mangrove Sekunder</td></tr><tr><td>7</td><td>Hutan Tanaman</td><td>0.8</td></tr><tr><td>8</td><td>Belukar Rawa</td><td>0.6</td></tr><tr><td>9</td><td>Belukar</td><td>0.4</td></tr><tr><td>10</td><td>Perkebunan</td><td>0.45</td></tr><tr><td>11</td><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.4</td></tr><tr><td>12</td><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td></tr><tr><td>14</td><td>Sawah</td><td>0.35</td></tr><tr><td>15</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr><tr><td>16</td><td>Transmigrasi</td><td>0.2</td></tr><tr><td>17</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.15</td></tr><tr><td>18</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr><tr><td>19</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr><tr><td>20</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr><tr><td>21</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.1</td></tr><tr><td>22</td><td>Pertambangan</td><td>0.05</td></tr><tr><td>23</td><td>RTH</td><td>0.6</td></tr><tr><td>24</td><td>RHL</td><td>0.6</td></tr></table> Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025	No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	1	Hutan Lahan Kering Primer	1	2	Hutan Rawa Primer	3	Hutan Mangrove Primer	4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	5	Hutan Rawa Sekunder	6	Hutan Mangrove Sekunder	7	Hutan Tanaman	0.8	8	Belukar Rawa	0.6	9	Belukar	0.4	10	Perkebunan	0.45	11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	12	Pertanian Lahan Kering	0.35	14	Sawah	0.35	15	Savanna	0.2	16	Transmigrasi	0.2	17	Bandara/Pelabuhan	0.15	18	Tambak	0.1	19	Tubuh Air	0.1	20	Tanah Terbuka	0.1	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1	22	Pertambangan	0.05	23	RTH	0.6	24	RHL	0.6		
No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)																																																																							
1	Hutan Lahan Kering Primer	1																																																																							
2	Hutan Rawa Primer																																																																								
3	Hutan Mangrove Primer																																																																								
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9																																																																							
5	Hutan Rawa Sekunder																																																																								
6	Hutan Mangrove Sekunder																																																																								
7	Hutan Tanaman	0.8																																																																							
8	Belukar Rawa	0.6																																																																							
9	Belukar	0.4																																																																							
10	Perkebunan	0.45																																																																							
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4																																																																							
12	Pertanian Lahan Kering	0.35																																																																							
14	Sawah	0.35																																																																							
15	Savanna	0.2																																																																							
16	Transmigrasi	0.2																																																																							
17	Bandara/Pelabuhan	0.15																																																																							
18	Tambak	0.1																																																																							
19	Tubuh Air	0.1																																																																							
20	Tanah Terbuka	0.1																																																																							
21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1																																																																							
22	Pertambangan	0.05																																																																							
23	RTH	0.6																																																																							
24	RHL	0.6																																																																							

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</i>		
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dihitung berdasarkan aspek: 1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas 8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH. <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
2.	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan per tahun}}{\text{Kebutuhan Pangan per tahun}} \times 100\%$ Keterangan: Ketersediaan pangan (TS) adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah untuk	Laporan Neraca Bahan Makanan Dinas Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu $TS = O - \Delta St + M - X$ dimana, TS = total penyediaan dalam Negeri (<i>total supply</i>) O = produksi ΔSt = stok akhir – stok awal M = impor X = ekspor Kebutuhan pangan (TU) dalah jumlah pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat agar tercapai pola konsumsi pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang sesuai standar gizi $TU = F + S + I + W + Fd + Rou$ dimana, TU = Total penggunaan (<i>total utilization</i>) F = Pakan S = Bibit I = Industry W = Tercecer Fd = Ketersediaan bahan makanan Rou = Penggunaan lain - Rasio $\geq 100\%$ = ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan penduduk. - Rasio $< 100\%$ = menunjukkan potensi kekurangan pangan.	Hidup dan Pangan	
		Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishmet)	Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) adalah Proporsi penduduk yang tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat hidup sehat dan aktif	Laporan Analis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$PoU = \int_{x < MDER}^s f(x) d(x)$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ Keterangan: $f(x)$ = fungsi densitas $CV(x)$ = total simpangan baku $CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita $CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179 Sumber : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)	Hidup dan Pangan	
		Skor PPH Konsumsi	Langkah dan Formulasi Perhitungan PPH Konsumsi : 1. Pengelompokkan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE)	Laporan Analis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Tenaga Kerja
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Misi Ke-1 SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 2. Misi Ke-3 BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsif, adaptif, dan transparan 3. Misi Ke-4 MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah pedesaan 4. Misi Ke-5 EKONOMI KUAT - Peningkatan daya Tarik investasi ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
TUGAS	: Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB tahun berjalan atas dasar konstan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP = - bobot 30 komponen perencanaan - bobot 30 komponen pengukuran kinerja - bobot 15 komponen pelaporan kinerja - bobot 25 komponen evaluasi Komponen perencanaan, yang dinilai: 1. ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen pengukuran, yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward dan punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Komponen pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan Analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat rencana aksi tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Komponen evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE tindaklanjut 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. System mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan IKM Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran. 2. Membangun kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Pelayanan administratif dinas di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	$\frac{\text{Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$ - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penginapan dan retribusi parkir, yang sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah. - Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	BPKPD	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Th. N} - (\text{N} - 1)}{\text{Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun N} - 1} \times 100\%$ Merupakan hasil perhitungan dari selisih PDRB Sektor Ekonomi Kreatif dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya. PDRB Sektor Ekonomi Kreatif meliputi Penyediaan Akomodasi dan Mamin, Informasi dan Komunikasi, Industri pengolahan, Konstruksi, Jasa Lainnya.	BPS	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			----- x100% Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan - Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan di darat dan/atau air, yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. - Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama, yaitu: Adat istiadat, Bahasa, Manuskrip, Olahraga tradisional, Pengetahuan tradisional, Permainan rakyat, Ritus, Seni, Teknologi tradisional, Tradisi lisan. - Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) ditetapkan oleh Bupati. Penetapan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan untuk Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai:	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Perhubungan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Infrastruktur strategis untuk mengurangi kesenjangan anatar wilayah
TUGAS	: tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 4. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan di bidang perkeretaapian yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 5. Pelaksanaan fasilitasi terkait bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter kewenangan Kabupaten serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 6. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas Konektivitas Transportasi Antar Wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Koneksi kecamatan yang sudah terlayani}}{\text{Jumlah Kecamatan dalam suatu wilayah}} \times 100 \%$ Penjelasan: Persentase konektivitas transportasi antar wilayah adalah tingkat keterhubungan jaringan layanan angkutan umum yang diukur dari perbandingan jumlah kecamatan yang dilayani angkutan umum terhadap total kecamatan dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, dan dinyatakan dalam persentase. Keterangan: - Kecamatan yang terlayani angkutan umum: Kecamatan yang dilewati trayek bus, angkot, angdes - Total kecamatan: seluruh kecamatan dalam suatu wilayah Interpretasi Sederhana: - < 50% : konektivitas rendah - 50–75% : konektivitas sedang - > 75% : konektivitas baik	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya kualitas angkutan publik yang	Persentase Jumlah Kendaraan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan Wajib uji Tahun ini}}{\text{Jumlah kendaraan Wajib uji Tahun kemarin}} \times 100 \%$	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	memenuhi standar keselamatan	Bermotor yang laik jalan	Penjelasan: - Jumlah Kendaraan Wajib uji Tahun ini adalah jumlah kendaraan wajib uji yang telah melaksanakan proses uji dan di nyatakan lulus uji oleh seorang penguji dengan dibuktikan dengan pemberian Bukti Lulus Uji pada tahun berjalan. - Jumlah Kendaraan Wajib uji Tahun kemarin adalah jumlah kendaraan wajib uji yang telah melaksanakan proses uji dan di nyatakan lulus uji oleh seorang penguji dengan dibuktikan dengan pemberian Bukti Lulus Uji pada tahun sebelumnya. Adapaun kendaraan wajib uji terdiri dari: 1. Angkutan penumpang umum 2. Bus 3. Mobil Barang (Angkutan Barang) 4. Kereta Gandeng 5. Kereta Tempelan		
3.	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan	Persentase perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana kelengkapan jalan yg terpasang/dipelihara}}{\text{Jumlah sarana prasarana kelengkapan jalan yang dibutuhkan}}$ Penjelasan:	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pencapaian pemasangan atau pemeliharaan perlengkapan jalan sebagai perbandingan jumlah unit yang dibutuhkan - Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang ataupun terpelihara sepanjang jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di wilayah Kabupaten Magetan - Terpeliharanya Traffic Light (TL) di wilayah Kabupaten Magetan		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP = - bobot 30 komponen perencanaan - bobot 30 komponen pengukuran kinerja - bobot 15 komponen pelaporan kinerja - bobot 25 komponen evaluasi Komponen perencanaan, yang dinilai: 1. ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen pengukuran, yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward dan punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Komponen pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan Analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat rencana aksi tahun berikutnya Komponen evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. LHE tindaklanjut 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. System mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan SKM Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis umkm, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan usaha perdagangan	$((\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun } n-1) / (\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n-1)) \times 100\%$ Jumlah usaha perdagangan adalah banyaknya unit usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang/jasa di suatu wilayah tertentu, baik skala besar maupun kecil, formal maupun informal, dalam kurun waktu tertentu.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	$((\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun } n-1) / (\text{Jumlah Total Industri Tahun } n-1)) \times 100\%$ Jumlah Total Industri adalah jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah yang terdaftar di wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk	Inspektorat Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat 2. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah
FUNGSI	: 1. Merumuskan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan 2. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan 4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; dan 5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	$\frac{Jml\ Rumah\ Tangga - (backlog + baseline\ RTLH) + (penanganan\ RTLH + Jml\ Rumah\ Formal)}{Jml\ rumah\ tangga} \times 100\%$ <i>Dimana:</i> <i>Jumlah rumah tangga</i> merupakan keseluruhan unit yang terdiri dari seorang atau beberapa orang, baik memiliki hubungan darah maupun tidak, yang menempati sebagian atau seluruh bangunan dan mengelola kebutuhan sehari-hari dari satu dapur bersama. Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 224.004 rumah tangga. <i>Backlog</i> adalah kekurangan rumah yang harus dipenuhi agar seluruh rumah tangga memiliki hunian layak. Pada formulasi di atas, yang digunakan adalah data Backlog Kepemilikan dengan definisi jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri (masih menumpang, kontrak, kos, dsb). Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 42.428 rumah tangga. <i>Baseline RTLH</i> merujuk pada data RTLH yang berhasil dihimpun oleh Dinas Perkim sejumlah 3000 rumah tangga.	Dinas Perkim	Kepala Dinas Perkim

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Penanganan RTLH</i> merupakan jumlah penanganan berupa rehabilitasi atau pembangunan RTLH pada tahun <i>n</i>. <i>Jml Rumah Formal</i> didapatkan dari jumlah unit perumahan pengembang yang terbangun pada tahun <i>n</i>.		
2.	Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman} - \text{sisa luas kumuh tahun } n}{\text{Luas permukiman}} \times 100\%$ <i>Dimana:</i> <i>Luas Permukiman</i> merupakan luas keseluruhan permukiman kabupaten Magetan (data BPS) <i>Sisa luas kumuh tahun n</i> adalah luas permukiman kumuh sesuai SK kumuh bupati tahun 2025 yang telah dikurangi penanganan pada tahun <i>n</i>	Dinas Perkim	Kepala Dinas Perkim
3.	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah pensertifikatan tahun } n + \frac{\text{Luas Pemetaan bidang tahun } n}{\text{Luas bidang se - kab Magetan}})}{2} \times 100\%$ <i>Jumlah pensertifikatan tahun n</i> adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun <i>n</i> atas bidang aset yang menjadi kewenangan Dinas. <i>Jumlah rencana pensertifikatan</i> adalah jumlah bidang aset dalam kewenangan Dinas yang belum bersertifikat.	Dinas Perkim	Kepala Dinas Perkim

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Luas Pemetaan bidang tahun n</i> adalah luas pemetaan bidang tanah yang telah dilaksanakan pada tahun n. <i>Luas bidang se-kab Magetan</i> adalah luas Kabupaten Magetan sesuai data BPN.		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Perkim

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = Jumlah indeks <u>jumlah indeks per parameter</u> X 25 Jumlah parameter 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perkim

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Peternakan dan Perikanan
MISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
VISI	: Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
TUGAS	: Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang Produksi Peternakan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha Tani Peternakan; 4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Perikanan; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Peternakan dan Perikanan; 6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Peternakan dan Perikanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya populasi komoditas peternakan	Total populasi komoditas peternakan	Populasi ternak = jumlah ternak komoditas tertentu pada tahun n Total populasi komoditas termak pada masing masing jenis ternak tahun n 1. Sapi potong (ekor) 2. Sapi Perah (ekor) 3. Ayam potong (ekor) 4. Ayam petelur (ekor)	Laporan statistik Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Total produksi perikanan budidaya	$\frac{\text{Luas lahan budidaya (m}^2\text{) x rata rata panen (kg) x frekuensi panen}}{1.000 \text{ kg}}$ Komponen penghitungan: 1. Luas lahan budidaya: Total lahan (kolam, keramba, wadah budidaya lainnya yang digunkana (m ² /ha) 2. Rata rata panen: Hasil panen sekali tebar 3. Frekuensi panen per tahun: Jumlah siklus panen dalam 1 tahun 4. Produksi budidaya terpengaruhi oleh jenis ikan karena adanya perbedaan pada rata rata panen dan frekuensi panen	Laporan Statistik Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
		Total produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Jumlah nelayan tangkap PUD x rata-rata hasil tangkapan nelayan/tahun (kg)}}{1.000 \text{ kg}}$	Laporan Statistik Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Definisi operasional: Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) adalah jumlah total hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan di perairan darat (sungai, waduk, embung, rawa, dan danau) dalam kurun waktu satu tahun, yang dihitung berdasarkan rata-rata hasil tangkapan per nelayan per tahun dikalikan jumlah nelayan, dan dikonversi ke dalam satuan ton.		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Peternakan dan Perikanan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} : \frac{\text{Jumlah Indeks per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelavanoan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan hasil Indeks kepuasan Masyarakat Dinas Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Meningkatkan kesejahteraan dengan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
TUGAS	: Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
FUNGSI	: 1. Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pelaksanaan avaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	<u>Jumlah Peningkatan status Desa (DM) x 100</u> Jumlah Desa 1. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar 2. Kondisi sosial masyarakat desa 3. Aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 4. Kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup 5. Kemudahan akses terhadap fasilitas dan layanan 6. Kualitas administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa	Laporan Penetapan Nilai indeks Desa (Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta	Inspektorat Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

		memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan	
--	--	---	--

			3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VISI	: Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
MISI	: EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja,dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran
TUGAS	: Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan Kebijakan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dan 5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	Formulasi: Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru Tahun N Definisi: Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru merupakan Penanam Modal baru yang berinvestasi di Kabupaten Magetan pada Tahun n. Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru dihitung dengan melihat jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru yang diterbitkan oleh sistem OSS pada Tahun n Tipe Perhitung : Non Kumulatif	OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Formulasi: $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah Indeks Per Parameter}}{\text{Jumlah Parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) Parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan Hasil SKM DPMPTSP Tahun n	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Definisi: Nilai IKM merupakan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan Tipe Perhitungan: Non Kumulatif		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP	Formulasi: Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Definisi: Nilai SAKIP adalah skor atau predikat yang diperoleh instansi pemerintah dalam penilaian efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tipe Perhitungan: Non Kumulatif		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Misi Ke- 1 SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat. 2. Misi Ke- 4 MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan.
TUGAS	: Membantu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ i = Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i	BKKBN	Kepala Dinas PPKB dan PA
2.	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga = 1/3 x (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan Keluarga) x 100	BKKBN	Kepala Dinas PPKB PP dan PA
3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IKG (Indeks Ketimpangan Gender) adalah sebuah indeks yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan politik), dan partisipasi di pasar tenaga kerja.	BPS Provinsi Jawa Timur	Kepala Dinas PPKB PP dan PA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Indeks Perempuan : $G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,01}{Faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot SE_F)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_F}$ Indeks Laki-Laki : $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$ Agregasi Indeks Perempuan dan Laki-Laki : $HARM(G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ Indeks Kesehatan : $Kesehatan = \frac{(\sqrt{\frac{0,01}{Faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}} + 1)}{2}$ Indeks Pemberdayaan : $Pemberdayaan = \frac{\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M}}{2}$ Indeks Pasar Tenaga Kerja : $IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Indeks Seluruh Dimensi : $G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan.Pemberdayaan.IPK}$ Indeks Kesenjangan Gender : $Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_F,G_M)}{G_{F,M}}$ Indeks Ketimpangan Gender : $IKG = 1 - \frac{HARM(G_F,G_M)}{G_{F,M}}$ Keterangan: G_F : Indeks Perempuan G_M : Indeks Laki-laki Faskes : Proporsi persalinan yang tidak difasilitasi kesehatan ULP : Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_F : Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR_M : Persentase laki-laki yang duduk di parlemen SE_F : Persentase perempuan pendidikan minimal SMA SE_M : Persentase laki-laki pendidikan minimal SMA TPAK_F : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK_M : Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan : Indeks pemberdayaan IPK : Indeks pasar kerja G_{F,M} : Indeks dimensi		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	$\text{Rasio KDRT} = \frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ Kriteria korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh anggota pasangan keluarga atau orang terdekat (misalnya, pasangan, ayah, ibu, atau anak nenek kakek asisten dst) dan menyebabkan dampak seperti luka fisik, trauma psikologis, rasa takut, tidak berdaya, atau kehilangan kemandirian ekonomi.	Bidang PPPA	Kepala Dinas PPKB PP dan PA
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah proses evaluasi atau peninjauan terhadap implementasi indikator-indikator KLA untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil membangun sistem berbasis hak anak. Total Skor KLA Terdiri dari Unsur: 1. Kelembagaan 2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan 3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kementerian PPPA	Kepala Dinas PPKB PP dan PA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 6. Klaster V: Perlindungan Khusus 7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan		
6.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas PPKB PP dan PA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas PPKB PP dan PA	Kepala Dinas PPKB PP dan PA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum	Rasio ketercakupan Infrastruktur= $\frac{\sum \text{capaian kinerja bidang urusan}}{\text{jumlah bidang urusan}}$ komponen jumlah bidang urusan Ketercakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum meliputi: 1. Layanan Irigasi Multikomoditas 2. Kemantapan Jalan 3. Akses Air Minum Aman 4. Sanitasi Aman 5. Drainase Tidak Tergenang 6. Gedung Kondisi Baik 7. Pelaku Jasa Konstruksi yang berkualitas 8. Penataan Ruang	Dinas PUPR	Kepala Dinas PUPR
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas PUPR

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas PUPR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Sosial
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang sosial; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB												
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	Dimensi Kebutuhan Dasar: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi kebutuhan dasar dibangun dari beberapa kumpulan variabel (pangan, papan/hunian, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, <i>physical mobility</i>, rasa aman) Variabel Pangan dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ketahanan Pangan</td><td>Kecukupan pangan individu</td><td>DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kecukupan Gizi</td><td>Akses & kualitas konsumsi pangan</td><td>BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)</td></tr></table>	No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)	2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
No	Indikator	Item	Sumber Data														
1.	Ketahanan Pangan	Kecukupan pangan individu	DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)														
2.	Kecukupan Gizi	Akses & kualitas konsumsi pangan	BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)														

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Variabel Papan/Hunian dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Rumah Layak Huni	Kualitas dan kepemilikan hunian	DTSEN		
			2.	Sanitasi Layak	Akses dan kualitas sanitasi	DTSEN		
			3.	Air Minum Layak	Kualitas dan sumber air minum	DTSEN		
			Variabel Kesehatan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Derajat Kesehatan	Stunting dan keluhan kesehatan kronis	BPS & DTSEN		
			2.	Akses Layanan Kesehatan	Akses terhadap layanan kesehatan	Podes		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																								
			Variabel Pendidikan dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bantuan Pendidikan</td><td>Program bantuan pendidikan</td><td>DTSEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Jenjang Pendidikan</td><td>Eksisting jenjang pendidikan masyarakat</td><td>DTSEN</td></tr></table> Variabel Jaminan Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jaminan Sosial</td><td>Cakupan kepemilikan jaminan sosial</td><td>DTSEN & Data dari Kab/Kota</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bantuan Sosial</td><td>Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)</td><td>DTSEN & Pusdatin</td></tr></table>				No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN	2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN	No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	DTSEN & Data dari Kab/Kota	2.	Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)	DTSEN & Pusdatin		
No	Indikator	Item	Sumber Data																													
1.	Bantuan Pendidikan	Program bantuan pendidikan	DTSEN																													
2.	Jenjang Pendidikan	Eksisting jenjang pendidikan masyarakat	DTSEN																													
No	Indikator	Item	Sumber Data																													
1.	Jaminan Sosial	Cakupan kepemilikan jaminan sosial	DTSEN & Data dari Kab/Kota																													
2.	Bantuan Sosial	Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)	DTSEN & Pusdatin																													

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Variabel <i>Physical Mobility</i> dihitung dari beberapa indikator, yaitu:					
			No	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum	Data dari Kab/Kota		
			2.	Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas	Data dari Kab/Kota		
			3.	Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri	Kemampuan untuk mobilitas	DTSEN		
			4.	Akses ke Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Akses terhadap layanan rehabilitasi	Data dari Kab/Kota		
			Variabel Rasa Aman dihitung dari indikator, yaitu:					
			No.	Indikator	Item	Sumber Data		
			1.	Keamanan Lingkungan	Perasaan aman pada lingkungan	DTSEN & BPS		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB								
					sosial bermasyarakat											
2.	Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Nilai Dimensi Peranan Sosial	Dimensi Peranan Sosial: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi Peranan Sosial dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi, kohesi sosial, kelembagaan inklusif) Variabel Partisipasi dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Keikutsertaan</td><td>Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP)</td><td>Data dari Kab/Kota</td></tr></table>				No	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Keikutsertaan	Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP)	Data dari Kab/Kota	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
No	Indikator	Item	Sumber Data													
1.	Keikutsertaan	Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP)	Data dari Kab/Kota													

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
			2.	Keputusan	Terdapat kelompok rentan yang memberikan saran/ masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
					Jumlah keterwakilan kelompok rentan yang memberikan saran/masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP)	Data dari Kab/Kota		
			3.	Kontrol	Terdapat kelompok/organi	Data dari Kab/Kota		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
					sasi rentan di Kabupaten/Kota					
					Masyarakat rentan yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Data dari Kab/Kota				
			Variabel Kohesi Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu:							
			No	Indikator	Item	Sumber Data				
			1	Relasi Sosial	Masyarakat rentan yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Data dari Kab/Kota				
					Keberadaan anggota keluarga	DTSEN				
			2	Keterhubungan	Kejadian kekerasan/bullying terhadap masyarakat rentan	Data dari Kab/Kota				
					Masyarakat rentan terlantar yang mendapat	SPM Sosial				

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					rehabilitasi sosial diluar panti			
			3	Kepatuhan Sosial	Perilaku kriminalitas dalam setahun	Data dari Kab/Kota		
			4	Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni	BPS		
					Indeks Ketimpangan Gender	BPS		
					Sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Data dari Kab/Kota		
					Sekolah non-SLB yang memiliki siswa disabilitas	Data dari Kab/Kota		
					Masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Data dari Kab/Kota		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB					
			5 .	Kualitas Hidup	Rata-rata jam kerja	DTSEN							
					Masyarakat yang mengakses layanan poli jiwa/ psikiater (depresi, stress, kecemasan)	Data dari Kab/Kota							
			Variabel Kelembagaan Inklusif dihitung dari beberapa indikator, yaitu:										
			No.	Indikator	Item	Sumber Data							
			1.	Kepastian Hukum	Nilai kepercayaan publik	Penilaian SPI KPK							
			2.	Kebijakan Inklusif	Kebijakan (Perda/Perbup) mengatur	Data dari Kab/Kota							
			3.	Insentif Ekonomi	Persaingan usaha	KPPU, LKPP, IDI							
					Tata kelola pengadaan	LKPP							
			3.	Meningkatnya Keberdayaan	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	Dimensi Keberdayaan Ekonomi: Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula				Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																								
	Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan		penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut: $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel Dimensi Keberdayaan Ekonomi dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi dalam aktivitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi) Variabel Partisipasi dalam aktivitas ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Indikator</th><th>Item</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Jumlah Penduduk</td><td>Sensus/ Proyeksi Penduduk</td></tr><tr><td>2.</td><td>PDRB ADHB</td><td>Nilai PDRB ADHB</td><td>BPS</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>Pengeluaran Per Kapita</td><td>BPS</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td><td>BPS</td></tr><tr><td>5.</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>Tingkat Kemiskinan</td><td>BPS</td></tr></table>	No.	Indikator	Item	Sumber Data	1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk	2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS	3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS	4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS	5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS		
No.	Indikator	Item	Sumber Data																										
1.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Sensus/ Proyeksi Penduduk																										
2.	PDRB ADHB	Nilai PDRB ADHB	BPS																										
3.	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita	BPS																										
4.	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)	BPS																										
5.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	BPS																										

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					bangunan tempat tinggal			
					Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal	DTSEN		
					Omzet usaha	DTSEN		
					Aset bergerak	DTSEN		
					Aset tidak bergerak	DTSEN		
					Kepemilikan ternak	DTSEN		
4.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman	Jumlah Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman ----- x 100% Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial Keterangan: Perbandingan Jumlah Pilar Sosial / PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai pedoman pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial tahun (n)				Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pilar Sosial / Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya		
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks per Parameter Nilai IKM : ----- x 25 Jumlah Parameter 9 (sembilan) Unsur/parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju Dan Berkelanjutan
MISI	: 1. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian; 3. pengembangan prasarana pertanian; 4. pembinaan produksi di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 5. pembinaan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian; 7. pelaksanaan administrasi dinas di prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya produksi komoditas utama pertanian daerah	Peningkatan produksi tanaman pangan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Ini} - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin}} \times 100\%$ - Produksi tanaman pangan adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami padi dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa Gabah Kering Giling dalam satuan kwintal	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan produksi hortikultura	$\frac{\text{Produksi Hortikultura Tahun Ini} - \text{Produksi Hortikultura Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Hortikultura Tahun Kemarin}} \times 100\%$ - Produksi hortikultura adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami jeruk pamelو dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa buah segar dalam satuan kwintal	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan produksi komoditas perkebunan	$\frac{\text{Produksi Perkebunan Tahun Ini} - \text{Produksi Perkebunan Tahun Kemarin}}{\text{Produksi Perkebunan Tahun Kemarin}} 100\%$ - Produksi perkebunan adalah jumlah hasil panen dari luasan hektar lahan yang ditanami tebu dan berhasil dipanen - Wujud produksi hasil panen berupa Batangan dalam satuan kwintal	Laporan statistik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Magetan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Magetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Magetan	Camat Magetan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Magetan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Magetan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Magetan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Panekan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Panekan	Camat Panekan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Panekan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Panekan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Plaosan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Plaosan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Plaosan	Camat Plaosan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Plaosan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Plaosan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Plaosan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	Inspektorat Daerah	Camat Plaosan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Sidorejo
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Sidorejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Sidorejo	Camat Sidorejo
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sidorejo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Sidorejo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sidorejo	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	Inspektorat Daerah	Camat Sidorejo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Poncol
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Poncol	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Poncol	Camat Poncol
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Poncol

			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Poncol

			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
--	--	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Parang
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Parang	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Parang	Camat Parang
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Parang	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Parang

			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Parang	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	Inspektorat Daerah	Camat Parang

			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
--	--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Barat
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Barat	Camat Barat
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Barat	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Barat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Barat	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah	Camat Barat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: KECAMATAN KARTOHARJO
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Kartoharjo	Camat Kartoharjo
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Kartoharjo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kartoharjo	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah	Camat Kartoharjo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Karangrejo
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karangrejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Karangrejo	Camat Karangrejo
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karangrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Karangrejo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangrejo	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan	Inspektorat Daerah	Camat Karangrejo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Karas
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karas	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Karas	Camat Karas
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karas	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Karas

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karas	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	Inspektorat Daerah	Camat Karas

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Sukomoro
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Sukomoro	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sukomoro	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Sukomoro

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukomoro	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment,	Inspektorat Daerah	Camat Sukomoro

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Takeran
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Takeran	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Takeran	Camat Takeran
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Takeran	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Takeran

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Takeran	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Takeran

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Nguntoronadi
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Nguntoronadi	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Nguntoronadi

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Nguntoronadi

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Bendo
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bendo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Bendo	Camat Bendo
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Bendo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Bendo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bendo	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Bendo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Lembeyan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Lembeyan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Lembeyan	Camat Lembeyan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembeyan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Lembeyan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lembeyan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Lembeyan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Kecamatan Ngariboyo
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngariboyo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Ngariboyo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Ngariboyo

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: Kecamatan Maospati
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Maospati	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Maospati	Camat Maospati
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Maospati	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Maospati

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Maospati	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Maospati

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Kecamatan Kawedanan
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
TUGAS	: Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
FUNGSI	: Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kawedanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Kawedanan	Camat Kawedanan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kawedanan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi: 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magetan	Camat Kawedanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kawedanan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Inspektorat Daerah	Camat Kawedanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

SKPD : KECAMATAN PANEKAN
 Visi : Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
 Misi : Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif adaptifn dan transparan
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan, perundang-oun dangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 Parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Laporan SKM Kecamatan Panekan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian -Kasi Tata Pemerintahan - Kasi PMD - Kasi Kesos

2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya	Hasil EKK dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magetan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian -Kasi Tata Pemerintahan -Kasi PMD -Kasi Kesos																																	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan merupakan hasil evaluasi internal ats implementasi SAKIP yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Magetan <table><tr><th>No</th><th>Sub Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Komponen perencanaan</td><td>30.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Komponen pengukuran</td><td>30.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Komponen pelaporan</td><td>15.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja</td><td>25.00</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Akhir</td><td>100</td></tr></table> Komponen Perencanaan Yang Dinilai <table><tr><th>No</th><th>Sub Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen Perencanaan tersedia</td><td>6.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART</td><td>9.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</td><td>15.00</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Akhir</td><td>30.00</td></tr></table>	No	Sub Komponen	Bobot	1	Komponen perencanaan	30.00	2	Komponen pengukuran	30.00	3	Komponen pelaporan	15.00	4	Komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja	25.00	Nilai Akhir		100	No	Sub Komponen	Bobot	1	Dokumen Perencanaan tersedia	6.00	2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART	9.00	3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	Nilai Akhir		30.00	LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	- Camat - Sekcam - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag PEP - Kasi Tata Pemerintahan - Kasi PMD - Kasi Kesos
No	Sub Komponen	Bobot																																				
1	Komponen perencanaan	30.00																																				
2	Komponen pengukuran	30.00																																				
3	Komponen pelaporan	15.00																																				
4	Komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja	25.00																																				
Nilai Akhir		100																																				
No	Sub Komponen	Bobot																																				
1	Dokumen Perencanaan tersedia	6.00																																				
2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART	9.00																																				
3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00																																				
Nilai Akhir		30.00																																				

Komponen Pengukuran yang dinilai:

No	Sub Komponen	Bobot
1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6.00
2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan	9.00
3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward DAN Punishment , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00
Nilai Akhir		30.00

Komponen Pelaporan, yang dinilai :

No	Sub Komponen	Bobot
1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3.00
2	Dokumen Laporan kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas ats pencapaian kinerja ,informasi keberhasilan kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan	4.50
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi /.kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50
Nilai Akhir		15.00

Komponen Evaluasi, yang dinilai :

No	Sub Komponen	Bobot
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan	5.00
2	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara brkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50

			3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja/tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (unit kerja)	12.50		
			Nilai Akhir			25.00	

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 9 SKPD)**

SKPD : KECAMATAN PANEKAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET 2025 (3)	REALISASI		PENCAPAIAN TARGET (6)
			2024 (4)	2025 (5)	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Panekan	83	82,52	86,2	103,8 %
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan	85	84,70	87,25	102,6 %

Jumlah Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 : 3.696.563.293
Jumlah Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 : 3.509.753.837

Panekan, Januari 2025
CAMAT PANEKAN


 YANU HARI WIDOWO, S.STP
 Pembina IV/a
 NIP 1980012119980101002

CASCADING
KECAMATAN PANEKAN
RENSTRA 2025 - 2029 (2026 - 2030)

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN PANEKAN

IND:

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

POHON KINERJA :

**1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DAN PEMERINTAHAN DI
WILAYAH KECAMATAN PANEKAN (**
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

SATUAN KERJA :

1. KECAMATAN PANEKAN

SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN PANEKAN			
	IND:			
	1. NILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN			
	POHON KINERJA :			
1. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN PANEKAN(NILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN)				
SATUAN KERJA :				
1. KECAMATAN PANEKAN				

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN PANEKAN	
IND:	
1. NILAI SAKIP	
POHON KINERJA :	
1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN PANEKAN(NILAI SAKIP)	
SATUAN KERJA :	
1. KECAMATAN PANEKAN	

RENCANA AKSI TAHUN 2026
KECAMATAN PANEKAN

No	NOMENKLATUR RENJA	KEGIATAN UTAMA RHK LEVEL 1 POKIN LEVEL 2	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA HASIL KERJA RHK LEVEL 2 POKIN LEVEL 3	OUTCOME/OUTPUT	URAIAN KEGIATAN RHK LEVEL 3 POKIN LEVEL 4	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN PANEKAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan				
1.1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Panekan	Nilai Indeks Pelayanan Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi		

1.1.1	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Terlaksananya, Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
1.1.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat						
1.2	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif	Persentase Desa mandiri Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan		
1.2.1	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Terlaksananya Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.2.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						

1.3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan/desa serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan		
1.3.1	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan	Jumlah Sarana prasarana Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibina
1.3.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
1.3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
1.3.1.3	Evaluasi Kelurahan						
1.3.2	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	Jumlah pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah

1.3.3	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana,	Persentase masyarakat miskin yang
							Indeks Kepuasan Masyarakat
1.3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
1.4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan		
1.4.1	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Terlaksananya kamtibmas, penegakan peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan kamtibmas, penegakan peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan
1.4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah						

1.5	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan/desa serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial		
1.5.1	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1.5.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan	Indeks Kepuasan Masyarakat				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP				
3.1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keseekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan		

3.1.1	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
3.1.1.1	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
3.1.1.2	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
3.1.1.3	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
3.1.2	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.1.2.1	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						
3.1.2.2	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

3.1.3	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.1.3.1	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan						
3.1.3.2	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
3.1.3.3	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
3.1.3.4	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
3.1.3.5	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
3.1.3.6	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
3.1.3.7	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi						
3.2	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		
3.2.1	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.2.1.1	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan						
3.2.1.2	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
3.2.1.3	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
3.2.1.4	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
3.2.1.5	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
3.2.1.6	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
3.2.1.7	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi						
3.2.2	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
3.2.2.1	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
3.2.2.2	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

3.2.3	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.2.3.1	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						
3.2.3.2	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
3.3	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Panekan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		
3.3.1	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Nanekan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3.3.1.1	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
3.3.2	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Laporan Keuangan
3.3.2.1	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
3.3.2.2	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						